



SAYANGI KELUARGA ***JANGAN MUDIK!***



KETIKA KAMU MUDIK BISA SAJA KAMU TIDAK MENYADARI
BAHWA KAMU YANG MEMBAWA VIRUS ITU,
CEGAHLAH SEBELUM SEMUANYA TERLAMBAT.

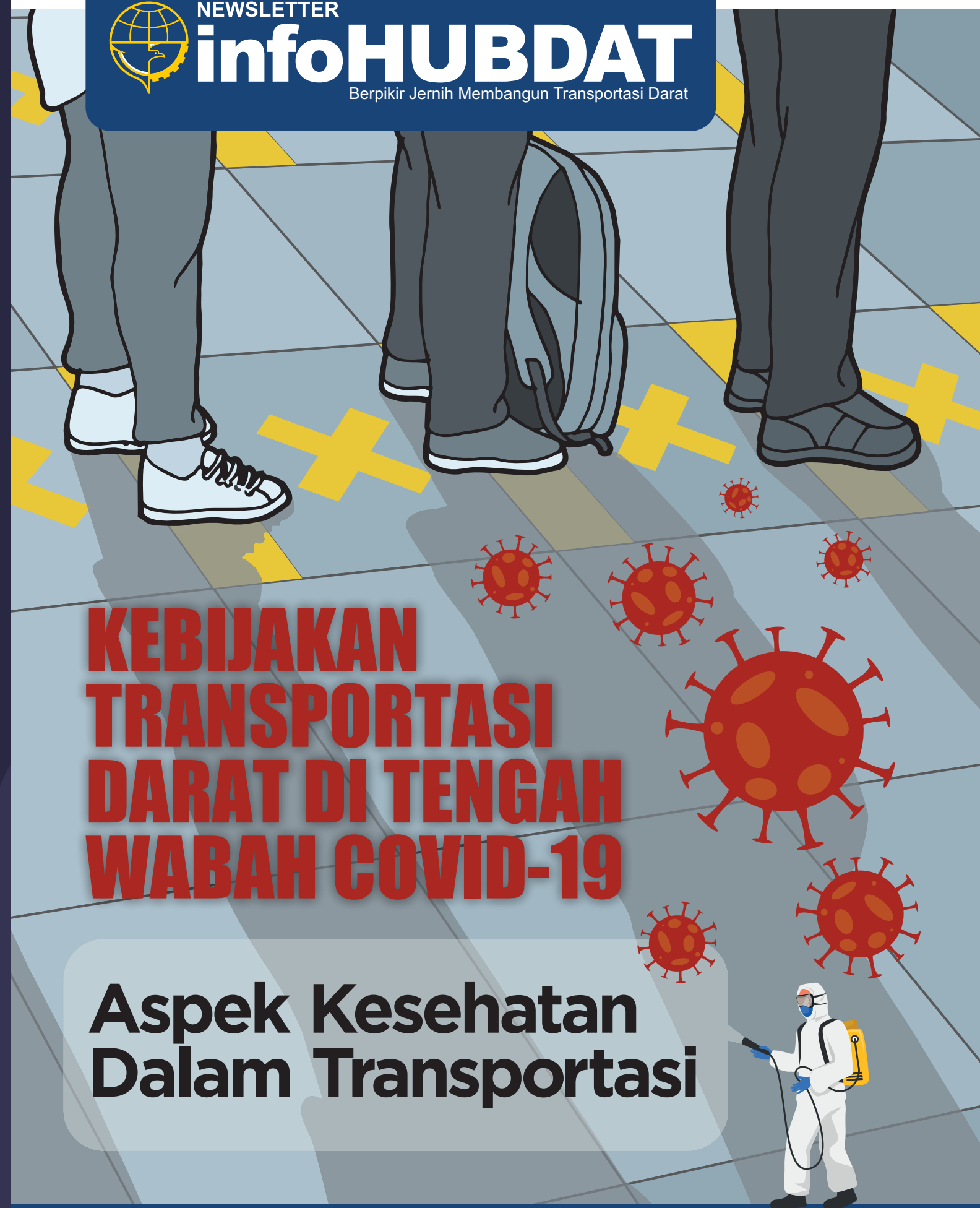
#tidakmudik #tidakpiknik



NEWSLETTER

infoHUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat



KEBIJAKAN TRANSPORTASI DARAT DI TENGAH WABAH COVID-19

Aspek Kesehatan Dalam Transportasi

Ditjen Hubdat akan mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran muatan lebih dan atau ukuran lebih. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Korlantas Polri maupun Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, serta Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Budi Setiyadi
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, melakukan pemotongan truk yang over dimensi pada rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat di Jakarta (2/3/2020). Foto: HMS DJPD/CAS

**MULAI 1 MEI 2020,
TIDAK ADA LAGI PENJUALAN
TIKET DI PELABUHAN**

BELI TIKET ONLINE **ferizy**
www.ferizy.com

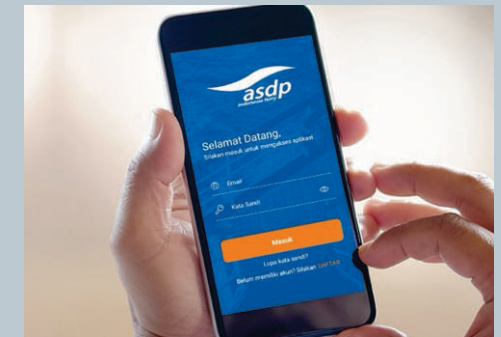
Berlaku di Pelabuhan:
Merak-Bakauheni & Ketapang-Gilimanuk

NAIK FERRY, EASY!
*S&K berlaku

Google Play

asdp

PELAYANAN PRIMA UTAMA



Ferizy dapat diakses melalui aplikasi Android



Peluncuran Ferizy bersamaan dengan Rakornis Ditjen Perhubungan Darat di Hotel Bidakara, Jakarta (2/3/2020). Foto: HMS DJPD/ABA

Modernisasi pada industri penyeberangan telah dimulai oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada saat terjadi perubahan yang signifikan pada pembelian tiket ferry yang sebelumnya didominasi transaksi manual menjadi digital dengan menggunakan sistem pembayaran nontunai dengan menggunakan uang elektronik di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk sejak 15 Agustus 2018. Namun, seiring berjalannya waktu pelaksanaan sistem pembayaran non tunai juga kerap mengalami kendala, sehingga tetap menimbulkan antrean. Metode *go show* di mana orang datang dan bisa beli tiket sering menimbulkan masalah yaitu jika masa *peak season* seperti liburan dan masa Angkutan Lebaran maupun Natal Tahun Baru, maka keadaan antrean kendaraan tidak terkendali. Kemudian pada saat *peak season*, pencatatan *manifest* dapat pula menyebabkan antrean panjang. Sehingga sejak awal tahun 2020 mulai digagas pemesanan tiket ferry secara elektronik sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dengan membangun aplikasi Ferizy untuk sistem pemesanan dan pembayaran tiket ferry.

Sistem online ticketing angkutan penyeberangan Ferizy diluncurkan pada tanggal 2 Maret 2020 di Hotel Bidakara bersamaan dengan Rakornis Ditjen Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui website dan aplikasi android. Sistem online ticketing ini akan resmi dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2020 di pelabuhan penyeberangan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Adapun manfaat dari *online ticketing* diantaranya:

- Kemudahan dan kecepatan memperoleh tiket.
- Penerapan diferensiasi tarif relatif cepat dan mudah.
- Memberikan keleluasan kepada pengguna jasa untuk manage waktu keberangkatan, pengguna jasa dapat mengatur waktu keberangkatan sesuai jadwal kapal, sehingga perjalanan makin efisien dan nyaman karena antrean lebih tertib.
- Membantu mengurangi antrean di pelabuhan (*pembelian tiket go show*), kapasitas pelabuhan menjadi lebih terkendali karena terdistribusi dengan baik karena terdapat kuota tiap jamnya, sehingga waktu tunggu di pelabuhan menjadi lebih terukur;
- pencatatan manifest untuk data asuransi yang menjadi hak pengguna jasa semakin akurat, karena pengguna jasa sudah melakukan pengisian data penumpang pada saat pemesanan tiket.

Dalam mendukung layanan online ticketing, PT. ASDP (Fersero) juga telah menambah kanal pembayaran, dimana tidak hanya melalui transfer bank, tetapi juga dengan *Finpay code* seperti membayar telepon serta melalui gerai retail modern seperti Alfamart Group, Yomart Group, PT Pos dan Pegadaian.(*)

Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia Newsletter infoHUBDAT yang budiman? Memasuki tahun 2020 ini, kita berjumpa lagi dalam edisi pertama infoHUBDAT. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada beberapa hal penting selama triwulan pertama di 2020 ini yang akan disampaikan, dengan harapan hal ini dapat menjadi bahan catatan dan refleksi kita bersama dalam hal pelayanan jasa transportasi darat.



Pembaca yang budiman, merebaknya wabah *Coronavirus Disease* atau Covid-19 di Indonesia dan juga di seluruh belahan dunia memiliki dampak luar biasa. Tidak hanya pada aspek kesehatan, namun berimbas pula pada seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pertahanan keamanan, termasuk juga transportasi, turut terdampak akibat pandemi ini. Salah satu catatan penting selama memasuki 3 bulan pertama di 2020 ini adalah bagaimana mencegah penyebaran Covid-19 namun tetap dapat menyelenggarakan jasa transportasi pada masyarakat. Pemerintah tidak menerapkan *lockdown*, namun dengan *physical distancing*, dan pembatasan pergerakan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi logistik, bahan pangan, dan obat-obatan hingga ke seluruh pelosok wilayah, memberi akses bagi masyarakat yang masih membutuhkan jasa transportasi, tentu dengan penerapan protokol kesehatan, seraya mencegah menyebarnya Covid-19.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam menghadapi pandemi Covid-19 antara lain dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Bidang Transportasi Darat, menutup operasional beberapa Jembatan Timbang (UPPKB), meniadakan Mudik Gratis, menginstruksikan untuk menjaga kebersihan Terminal Tipe A dan pelabuhan penyeberangan, menghentikan sementara operasi penegakan hukum kendaraan ODOL, hingga aksi solidaritas peduli berbagi nasi bungkus bagi para pekerja sektor informal.

Ada satu hal yang perlu saya garis bawahi yaitu meski operasi penegakan hukum kendaraan ODOL dihentikan sementara, tidak berarti ODOL dilegalkan, praktek ODOL tetaplah pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi denda maupun pidana. Pemerintah tetap konsisten dengan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama para pemangku kepentingan, dan terus menggaungkan semangat Indonesia Bebas ODOL 2023.

Akhir kata, pada kesempatan ini saya sampaikan himbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, jika terpaksa harus keluar rumah, selalu kenakan masker, dan terapkan protokol kesehatan. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat.

Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terimakasih atas kerjasama dan kerja keras Saudara-saudara sekalian, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.



**Ilustrasi Cover:
HMS DJPD/CAS**

Physical Distancing atau jaga jarak perlu diterapkan dalam transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19.

PENANGGUNG JAWAB
Imran Rasyid

REDAKTUR PELAKSANA
Endy Irawan

REDAKTUR UTAMA
Pitra Setiawan
Nanang Rahardjo
Aznal

REDAKTUR
Ardian Sukmaji
Adi Prabowo
Dinda Siahaan
Hanna Suryadika

**DESAIN GRAFIS
DAN FOTOGRAFI**
Arif Pintoko
M. Aulia Dharma
Herman Wibowo
Andrew Bryan Agustinus

SEKRETARIAT
Bejo Sri Wahono
Ratna Shaka Aprilda
Sari Hayu Hutami
Ely Rusnita
Nurhayati
Yudha Kurniawan
Kurniadi Zaini
Didik Prasetyo
Rifai Dyan Armananta
Sanudin
Rusdinal
Achmad Nanang
Rosmala Damayanti
Nova Yulianasari Sopiah
M. Yunus
Reza Saputra
Nurfadilah Sinta Ningrum
Ade Yunita

KONTRIBUTOR
Junedi Sembiring
Nurita Aprilianing Tyas
Marisa
Wahyu Arya Putra
Prisca Magdalena Samosir
Arief Eko Sumba
Cristian Andri Mardhani
Laurence
Erlika Affan
Ririn Scorviyanti
Rinto Mahendra Raharjo



Diterbitkan oleh
Humas Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 8
Gedung Karya Lantai 9
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : humas_hubdat@dephub.go.id
website : <http://hubdat.dephub.go.id/>

@hubdat151

ditjen perhubungan darat

@ditjen_hubdat

ditjen perhubungan darat

info Redaksi

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Pandemi Corona mengguncang dunia, seluruh warga dan para pemimpin dunia seolah tak beres tak dibuatnya. Di Indonesia, dampak yang ditimbulkan akibat pandemi ini sungguh luar biasa. Terlebih di kota-kota besar di mana pusat segala aktivitas masyarakat, pusat kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Padatnya jumlah penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya atau yang sering disebut wilayah aglomerasi perkotaan Jabodetabek menyebabkan tingginya frekuensi pergerakan masyarakat. Kondisi angkutan umum massal yang tidak memungkinkan untuk jaga jarak, sangat berpotensi pada meluasnya penyebaran Covid-19. Oleh karena itu penerapan protokol kesehatan dalam bertransportasi harus benar-benar dipatuhi.

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menampilkan Laporan Utama mengenai kebijakan pemerintah di bidang transportasi darat dalam menghadapi pandemi Corona. Beberapa artikel telah kami siapkan untuk mendukung laporan utama. Diawali dengan judul besar Kebijakan Transportasi Darat di Tengah Wabah Covid-19. Artikel ini dilengkapi dengan sub-sub judul antara lain: S.O.P. Pencegahan Penyebaran Covid-19 Bidang Transportasi Darat; Sejumlah UPPKB Tidak Beroperasi Untuk Mencegah Penularan Covid-19; Mudik Gratis Lebaran 2020 Ditiadakan; Jaga Kebersihan Terminal Tipe A dan Optimalkan Pelayanan; serta Instruksi Langkah Antisipasi Pencegahan Penyebaran Covid-19. Selain itu ada juga artikel pendukung yaitu Evaluasi Antrian Penumpang Transjakarta; dan Nasi Bungkus Gratis untuk Pekerja Sektor Informal. Masih dalam info utama, kami sajikan tulisan dari pengamat transportasi berjudul Aspek Kesehatan Dalam Transportasi dengan sub judul Transportasi Publik Harus Tersedia.

Kemudian, kami sajikan pula uraian mengenai langkah-langkah menuju Indonesia Bebas ODOL 2023. Pada topik ini, ada tulisan menarik dari pengamat transportasi mengenai Aksi Kendaraan ODOL di Tengah Pandemi Covid-19. Tak ketinggalan laporan kegiatan *The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Inland Transport Committee (ITC) High-Level Policy Segment on Environmental Challenges to Sustainable Inland Transport*, 25-26 Februari 2020 di Jenewa, Swiss, turut melengkapi edisi kali ini.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian. (*)

daftar isi

EDISI TRIWULAN 01 / 2020



Info Utama

04 Kebijakan Transportasi Darat di Tengah Wabah Covid-19

Menyikapi penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, mengeluarkan sejumlah kebijakan di sektor transportasi darat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menekan penyebaran virus sekaligus juga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

10 Evaluasi Antrian Penumpang Transjakarta

11 Aspek Kesehatan Dalam Transportasi

15 Nasi Bungkus Gratis Untuk Pekerja Sektor Informal

Info Khusus

16 Tanpa Penegakan Hukum, Kendaraan ODOL Merajalela

18 Menuju Indonesia Bebas ODOL 2023

19 Langkah Preventif dan Represif Berantas ODOL

20 Truk ODOL Dilarang Masuk Pelabuhan Penyeberangan

21 Truk ODOL Dilarang Melintas Jalan Tol Jakarta- Bandung

24 Pelarangan ODOL Berlaku Penuh Awal 2023

Info Umum

26 Siapkan Langkah Strategis Dengan Rakornis

28 Peluncuran Aplikasi Dipass Dan Ferizy

Info Angkutan

30 Angkutan Antarmoda Pendukung Bandara YIA

Info KSLN

32 Dirjen Hubdat Sampaikan Komitmen Indonesia Di Forum UNECE-ITC, Swiss



Info Selintas

- 33**
- Bus Air Untuk Danau Sentani dan Danau Toba
 - Pentingnya Dokumen Andalalin Sebagai Rekomendasi Pembangunan Infrastruktur
 - Pemberlakuan BLUe di UPUBKB Pulogadung
 - Penerapan Sistem *Weigh In Motion* (WIM) di Jembatan Timbang
 - Tingkatkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Ditjen Hubdat Gelar Bimtek di Bandung
 - Angkutan Penyeberangan Akan Mengalami Penyesuaian Tarif Sekitar 11%
 - Dirjen Hubdat Minta Pemda Optimalkan Manajemen Transportasi Massal
 - Pengembangan Industri Kendaraan Komersil Harus Selaras dengan Keselamatan Berkendara

Lensa Hubdat

- 37**
- Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

KEBIJAKAN TRANSPORTASI DARAT DI TENGAH WABAH COVID-19

Oleh: Tim infoHUBDAT

Menyikapi penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, mengeluarkan sejumlah kebijakan di sektor transportasi darat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menekan penyebaran virus sekaligus juga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Penyebaran wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, memiliki dampak yang luar biasa di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya aspek kesehatan, namun juga aspek sosial budaya, ekonomi, bahkan politik. Tersendatnya roda perekonomian yang diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, karena keterbatasan akses transportasi publik, kebijakan *work from home*, *study at home*, sangat terasa dampaknya terlebih di kota-kota besar. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebagai pengambil kebijakan bidang transportasi darat level nasional, mengambil beberapa langkah dalam penyelenggaraan transportasi darat di tengah wabah Covid-19 ini.

Langkah-langkah tersebut antara lain penerbitan Standar

Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Bidang Transportasi Darat, Pembatasan Operasional Satuan Pelayanan UPPKB, Mudik Gratis yang tidak jadi diadakan, instruksi untuk menjaga kebersihan Terminal Tipe A, menghentikan sementara operasi penegakan hukum kendaraan ODOL, hingga aksi peduli berbagi nasi bungkus untuk para pekerja sektor informal.

S.O.P. PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 BIDANG TRANSPORTASI DARAT

Untuk menghambat penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) di bidang sarana dan prasarana transportasi darat, maka perlu dilakukan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ketentuannya diatur dalam sebuah Standar Operasional Prosedur. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan

Darat Nomor KP.1629/UM.006/DRJD/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Bidang Transportasi Darat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan bahwa dalam Perdirjen tersebut diatur pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) akan dilaksanakan secara bersama-sama oleh berbagai unsur. "Ketentuan dalam SOP tersebut nantinya dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Balai Pengelola Transportasi Darat, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Operator Pelabuhan, dan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing," jelas Dirjen Budi.

Mengutip data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga Jumat, 27 Maret 2020, total positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 1.046 kasus,



Petugas gabungan BPBD, TNI, Polri, Dishub serta Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Rembang, Jawa Tengah, melakukan pengecekan beberapa penumpang bus AKAP di terminal Rembang, Senin (30/3/2020). Foto: Muhammad Minan Bashori

sementara 46 orang sembuh dan 87 meninggal dunia. Untuk itu, Ditjen Hubdat merasa perlu untuk menerapkan SOP ini di seluruh sarana dan prasarana transportasi darat mengingat semakin bertambahnya jumlah pasien yang terjangkit Covid-19.

Pencegahan penyebaran Covid-19 pada transportasi darat yang diatur dalam Perdirjen tersebut dilaksanakan pada:

- angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- terminal penumpang angkutan jalan;
- unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor;
- pelabuhan penyeberangan; dan
- pelabuhan sungai dan danau.

"Pencegahan penyebaran Covid-19 akan kami laksanakan

dengan penyiapan petugas dan sarana prasarana transportasi darat, pelaksanaan kegiatan pencegahan di sarana dan prasarana transportasi darat. Selain itu juga pencegahan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB/ jembatan timbang). Yang juga tidak boleh terlewat yaitu kegiatan pencegahan pada pelayanan penumpang pejalan kaki, maupun penumpang dengan kendaraan untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. Kalau sudah ada penumpang yang terindikasi terjangkit Covid-19 setelah deteksi dini maka harus segera dirujuk ke Rumah Sakit," jelas Dirjen Budi.

Secara umum, dalam Perdirjen tersebut baik penumpang maupun petugas akan diukur suhu tubuhnya dan dipastikan tidak melebihi 37,5° C. Selain itu pembersihan cairan disinfektan

juga harus dilakukan baik di sarana maupun prasarana dengan prioritas penyemprotan pada tempat dan alat yang sering disentuh. Fasilitas seperti cairan pembersih tangan, *thermogun*, atau *thermal scanner* harus tersedia. Penumpang juga diminta untuk tidak berdesakan dengan memperhatikan batas jarak aman 1 meter antarpemumpang.

SEJUMLAH UPPKB TIDAK BEROPERASI UNTUK MENCEGAH PENULARAN COVID-19

Guna mencegah penyebaran Covid-19 pada Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang, maka pada Kamis (26/3), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengeluarkan Surat nomor AJ.005/1/11/DJPD/2020 tentang Pembatasan Operasional Satuan Pelayanan UPPKB.

"Surat ini sebagai salah satu upaya pencegahan dan untuk meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 khususnya pada Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi pada Senin (30/3). Tambahnya, sejumlah UPPKB di wilayah BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat, BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY, BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur tidak dioperasikan atau ditutup.

"UPPKB di luar wilayah tersebut tetap beroperasi dengan beberapa ketentuan yaitu waktu operasional selama 5 jam sehari dan hanya untuk pendataan angkutan barang. Selain itu pengemudi juga awak kendaraan atau kernet dilarang turun dari kendaraan selama di area UPPKB," kata Dirjen Budi. Selain itu para petugas di UPPKB diwajibkan untuk melakukan



Penyemprotan disinfektan di ruang tunggu Terminal Giwangan, Yogyakarta.
Foto: Satpel Terminal Giwangan Yogyakarta.

beberapa hal yaitu mengenakan masker dan sarung tangan saat bertugas, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menghindari kontak fisik dengan menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari menyentuh wajah (mata, hidung, mulut). “Kami juga minta untuk melakukan pembersihan ruangan kerja dengan disinfektan setiap hari. Petugas kami juga harus menjaga kondisi tubuh dengan mengkonsumsi suplemen atau vitamin, juga menjaga kebersihan alat dan ruang kerja maupun lingkungan sekitar UPPKB,” tambah Dirjen Budi.

Dalam surat tersebut juga disebutkan apabila petugas UPPKB memiliki gejala sakit Covid-19 maka diharuskan untuk melapor dan melakukan pemeriksaan kesehatan di pusat layanan kesehatan terdekat.

Berkenaan dengan surat ini, para Kepala BPTD juga diminta untuk mengatur pembagian shift beserta jumlah personil yang bertugas dan waktu kerja personil yang bekerja di lapangan.

MUDIK GRATIS LEBARAN 2020 DITIADAKAN

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat resmi menghapus program mudik gratis pada masa Angkutan

Lebaran 2020. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari – 29 Mei 2020 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi pada Senin (23/3) menyatakan bahwa baik program mudik gratis yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan, BUMN, hingga swasta akan ditiadakan. “Melihat kondisi penyebaran virus Covid-19 yang begitu masif belakangan ini, saya rasa ini keputusan yang tepat walau berat, mudik gratis akan dibatalkan. Oleh karena itu saya harap masyarakat pun dapat mengerti dan mematuhi apa yang sedang dilakukan pemerintah. Saat ini kami juga aktif mendorong masyarakat untuk tidak mudik, meminimalisasi mobilitas agar tidak memperluas kemungkinan penularan Covid-19,” jelas Dirjen Budi.

Ia mengatakan untuk di Ditjen Perhubungan Darat, baik mudik gratis dengan bus dan kapal penyeberangan semuanya akan dihapuskan. “Saat ini kita akan berganti fokus, saling bantu-membantu antara pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi penularan Covid-19. Karena kita tahu dengan mudik,

artinya ada arus orang banyak yang akan melakukan perjalanan. Ini tentu berbahaya dan berisiko tinggi jika tetap dilakukan,” ujarnya.

Tambahnya lagi, Dirjen Budi mengharapkan peran serta masyarakat untuk tidak bepergian apalagi melakukan mudik pada saat libur Lebaran nanti. “Oleh karena itu kami sampaikan kepada masyarakat yang sudah mendaftar mudik gratis, kami mohon maaf atas pembatalan ini. Saya imbau juga untuk masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perjalanan dulu hingga situasi kondusif. Mudik ini melibatkan banyak massa, berpotensi menjadi titik penyebaran virus tersebut, yang mudik bepergian ke daerahnya masing-masing akan berpotensi membuat wilayah persebaran Covid-19 semakin luas. Kami akan gencarkan kampanye ini secara terus menerus,” pungkash Dirjen Budi dalam keterangannya.

JAGA KEBERSIHAN TERMINAL TIPE A DAN OPTIMALKAN PELAYANAN

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menginstruksikan kepada para Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal Tipe A di seluruh Indonesia terkait pencegahan penularan



Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menyemprotkan cairan disinfektan di dalam Bus Suroboyo di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 22 Maret 2020. (Foto: Antara/Zabur Karuru)

virus Covid-19. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengimbau para petugas yang melayani di terminal untuk menjaga diri dengan memperhatikan kesehatan dan kebersihan. Ia juga meminta agar pelayanan di sektor transportasi darat tetap berjalan normal dengan memperhatikan beberapa hal untuk mencegah merebaknya virus Covid-19.

“Selain menjaga kebersihan terminal, saya minta para petugas pelayanan juga mengenakan masker untuk meminimalisir penularan virus Covid-19. Kita harus sadar bahwa petugas-petugas kita akan berjumpa dengan masyarakat banyak, mereka juga adalah garda terdepan pelayanan kita,” jelas Dirjen Budi pada Jumat (20/3).

Dirjen Budi menyatakan bahwa para Korsatpel Terminal Tipe A juga akan diminta untuk mengedukasi para penumpang dan pengemudi mengenai cara mengurangi resiko terpapar virus Covid-19.

Dirjen Budi menyampaikan beberapa poin lainnya kepada para Korsatpel Terminal Tipe A yaitu: Bagi anggota yang bertugas harus mengenakan masker;

1. Pengemudi bus yang rawan terkena dan rawan penularan diminta mengenakan masker;
2. Mengarahkan semua orang di terminal untuk menggunakan masker dan menjaga jarak setidaknya 1 meter (social distancing);

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengimbau para petugas di terminal bus untuk menjaga diri dengan memperhatikan kesehatan dan kebersihan. Pelayanan di sektor transportasi darat diminta tetap berjalan normal dengan memperhatikan beberapa hal untuk mencegah merebaknya virus Covid-19.

3. Menjaga kebersihan terminal dengan menyemprot disinfektan secara berkala pada semua peralatan yang ada di terminal;
4. Mengarahkan pengemudi maupun operator bus untuk membersihkan dan menyemprot bus dengan disinfektan secara berkala;
5. Menyiapkan hand sanitizer di pintu-pintu masuk agar

- dapat digunakan masyarakat yang akan masuk terminal;
6. Memasang spanduk di lokasi strategis yang berisi imbauan untuk menjaga kebersihan dan mengurangi kontak langsung;
7. Ramp check bus dalam rangka antisipasi Angkutan Lebaran mulai dilaksanakan.

Dalam kesempatan yang sama juga Dirjen Budi menjelaskan bahwa pencegahan Covid-19 ini merupakan tanggung jawab bersama dan harus bersinergi baik antara petugas dan masyarakat.

“Saya juga meminta pada pelayanan angkutan umum tetap berjalan normal dengan memperhatikan social distancing. Sekali lagi ditekankan bahwa di dalam angkutan umum, kondisi penumpang tidak harus penuh, 50% terisi maka kendaraan sudah bisa berjalan,” tegasnya.

INSTRUKSI LANGKAH ANTISIPASI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan terdapat 2 orang Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia yang positif terjangkit virus Corona (Covid-19). Sebagai langkah antisipasi pencegahan penyebaran virus tersebut, Direktur Jenderal



Kepala Terminal Sukabumi Yukky Rahmat Yunus bersama jajarannya saat melakukan penyemprotan bus untuk memusnahkan virus Corona, Senin (23/3/2020)-firdaus



Transjakarta menyediakan hand sanitizer untuk penumpang. Foto: Liputan6.com

Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Perusahaan Angkutan Umum, Penyelenggara Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) serta Asosiasi di Bidang Transportasi Darat untuk melakukan tindakan pencegahan di seluruh sarana dan prasarana transportasi darat.

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SE.4/UM.006/DRJD/2020 tentang Antisipasi Pencegahan Penyebaran Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCov) pada sarana dan prasarana transportasi darat.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan baik di terminal maupun pelabuhan memang perlu diperketat dengan alasan terminal maupun pelabuhan sebagai tempat keluar masuk penumpang dari daerah satu ke daerah lainnya. Dengan pengamanan maksimal, ia berharap penularan Covid-19 bisa ditekan.

“Pihak kami juga akan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan serta para penyedia transportasi umum dalam penyediaan fasilitas kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona di tempat-tempat seperti terminal, angkutan, maupun pelabuhan ASDP. Hal yang dapat dilakukan antara lain; rutin membersihkan alat *tap on gate*, tempat duduk,

pintu, jendela, hingga pegangan untuk penumpang dengan menggunakan disinfektan baik sebelum dan sesudah beroperasi. Selain itu, harus disiapkan juga antiseptik, *alcohol based hand rub* atau *hand sanitizer* sebagai fasilitas untuk penumpang mencuci tangan,” kata Dirjen Budi.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak panik dan selalu mengikuti arahan dari petugas. “Jalankan pola hidup yang bersih dan sehat dengan selalu menjaga kebersihan dan menjaga etika ketika batuk dan bersin. Gunakan masker saat berada di ruang publik dan transportasi umum, serta kurangi sentuhan langsung dari tangan ke wajah,” ujarnya.*



Penumpang mengantri di Halte Transjakarta di Kota Tangerang, Banten, 16 Maret 2020. Operasional angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya dibatasi akibat pandemi virus corona, kondisi ini kemudian kembali normal pada keesokan harinya setelah adanya penambahan unit. (Foto:Jakartapost/Wendra Ajistyatama)

EVALUASI ANTRIAN PENUMPANG TRANSJAKARTA

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, pada Senin (16/3) sore meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar dan melakukan evaluasi atas terjadinya antrean panjang di halte Transjakarta pada pagi ini. Panjangnya antrean tersebut diakibatkan adanya kebijakan Transjakarta untuk menerapkan social distancing dengan hanya mengoperasikan 13 koridor bus mulai pukul 06.00 sampai 18.00 WIB dengan jarak waktu kedatangan bus (*headway*) 20 menit sekali.

“Saya harap baik Pemprov DKI Jakarta maupun Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi antrian penumpang Transjakarta dan mencegah kumpulan massa di halte. Untuk penentuan keputusan daerah seputar angkutan umum juga saya minta berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian

Perhubungan,” ujar Dirjen Budi saat memberikan keterangan.

Tambahnya lagi, mengenai kebijakan tersebut Dirjen Budi menyadari bahwa hal tersebut merupakan langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk mengatasi Covid-19 di wilayahnya. “Terkait dengan adanya wabah Coronavirus atau Covid-19, beberapa daerah melakukan kebijakan untuk menghindari adanya penyebaran begitu cepat atas Covid-19. Kita melihat bersama-sama bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kebijakan untuk mengatasi Covid-19 ini. Namun tadi pagi terjadi antrean cukup panjang di halte TransJakarta, oleh karena itu saya mengimbau kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa dengan adanya kerumunan masyarakat di halte kita hindari bahwa dengan kerumunan tersebut juga kontraproduktif dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi artinya kerumunan itu terjadi karena

frekuensi kendaraan dikurangi dan kemudian *headway*-nya menjadi lebih panjang,” demikian dijabarkan Dirjen Budi.

Ia menyatakan bahwa Kemenhub berharap antrean maupun kerumunan masyarakat yang ada di halte Transjakarta justru dapat dicegah. “Berarti harus ada penambahan frekuensi bus Transjakarta. Dengan penambahan frekuensi artinya kita akan memperpendek *headway* dan dengan pembatasan operasi mulai dari pukul 06.00 sampai 18.00 kita harapkan juga untuk masyarakat dapat menyesuaikan untuk pulang ke rumah masing-masing,” tambah Dirjen Budi.

Dalam pernyataan yang disampaikannya di Kemenhub, Dirjen Budi menyatakan bahwa ia berharap pada Pemprov DKI Jakarta untuk tetap melayani masyarakat meskipun terjadi penumpukan di halte. “Kalaupun sudah terjadi antrean saat akan ditutup pelayanan, harus dilayani antrean tersebut sehingga tidak terjadi antrean cukup panjang lagi yang justru memperparah keadaan karena terjadi sentuhan langsung sesama masyarakat di halte. Kita harapkan operator, Pemprov DKI Jakarta, maupun Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dapat mengatur jalannya antrean itu sehingga masyarakat

tidak menumpuk di 1 halte. Kita harapkan perubahan dengan penambahan frekuensi bus ini dapat kita lakukan segera dan diterapkan seterusnya sehingga apa yang terjadi tadi pagi tidak terulang pada hari berikutnya,” imbuhnya.

Salah satu hal yang ditekankan oleh Dirjen Budi yakni perihal antisipasi lonjakan penumpang di halte Transjakarta. Terkait hal tersebut, Dirjen Budi menyampaikan, “Manakala pengguna kendaraan pribadi cukup meningkat maka Pemprov DKI Jakarta termasuk Polda Metro Jaya sudah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kemacetan,” urainya.

Dirjen Budi menekankan bahwa pada kondisi saat ini, angkutan umum tidak harus beroperasi dalam kondisi penuh. “Kalau penumpang sudah mencapai 50% dalam satu armada, maka sudah harus jalan. Kami sebagai Pemerintah berharap untuk pencegahan Covid-19 butuh kerja sama semua pihak, kita harus kompak,” seru Dirjen Budi.

Terkait pencegahan Covid-19 di sektor transportasi darat, Dirjen Budi menyatakan pihaknya sudah mengeluarkan Surat Edaran beberapa hari lalu bagi operator kendaraan bus, kapal penyeberangan, termasuk operator dermaga dan terminal.

“Kami imbau untuk memperketat pemeriksaan kesehatan menyediakan *hand sanitizer* selain itu meminta penumpang kendaraan umum untuk menggunakan masker dan menjaga kapasitas kendaraan agar tidak penuh atau dalam kondisi maksimal. Alat *tap on gate*, tempat duduk, pintu, jendela hingga pegangan untuk penumpang harus dibersihkan dengan disinfektan baik sebelum dan sesudah beroperasi,” tambahnya.(*)



Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus di Halte Transjakarta. Foto : Iwan tri wahyudi/ Fajar Indonesia Network



Penerapan physical distancing atau jaga jarak antar orang di halte Transjakarta. Prosedur ini harus diterapkan bagi masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Foto: liputan6.com

ASPEK KESEHATAN DALAM TRANSPORTASI

Kemajuan teknologi transportasi ikut memudahkan virus menyebar ke mana-mana. Ke depannya tuntutan akan alat transportasi khususnya transportasi massal tidak hanya memenuhi syarat berkeselamatan. Tetapi juga syarat berkeselamatan, artinya ada fasilitas dan prosedur yang mementingkan pencegahan penyakit menular di dalam kendaraan (Muhammad Akbar, 2020). Penyelenggaraan transportasi tidak hanya melihat aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Sudah saatnya ditambah aspek kesehatan.

Menurut data dari University of Hamburg, Germany, jumlah kematian di dunia dalam dua bulan terakhir di tahun 2020 telah terjadi 2.360 orang meninggal akibat terinfeksi virus Corona. Angka kematian ini termasuk kecil jika dibandingkan dengan 69.602 orang meninggal akibat cuaca din-

gin, 140.584 orang meninggal akibat malaria, 193.479 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, 240.950 orang meninggal akibat HIV Aids, 358.471 orang meninggal akibat minuman alkohol, 716.498 orang meninggal akibat merokok dan 1.177.141 orang meninggal akibat kanker.

Kematian akibat kecelakaan lalu lintas 82 kali lipat dibanding kematian akibat terinfeksi virus Corona. Namun, persebaran virus Corona yang demikian cepat ke hampir seluruh negara di belahan dunia dan sudah membuat kepanikan masyarakat, tentunya tidak harus diabaikan begitu saja. Berapapun jumlah yang meninggal adalah penting, meski hanya satu nyawa yang hilang akan sangat berharga.

Merebaknya virus Corona ke beberapa negara termasuk Indonesia, telah membuat Pemerintah Indonesia mengantisipasi agar virus tersebut tidak menyebar luas. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan lima protokol, salah satunya Protokol di Area dan Transportasi Publik.

Khusus di transportasi publik, apabila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti mencuci tangan

menggunakan air dan sabun, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Aditif), tidak meludah di sembarang tempat, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.

Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan. Lakukan pembersihan menggunakan disinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu. Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, disarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikanlah masker kepada penumpang. Ukur suhu tubuh setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi. Terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.

Upaya *lockdown* seperti halnya di Wuhan (Tiongkok), atau beberapa

negara lain memang belum dilakukan. Bisa jadi pertimbangan ekonomi menjadi penyebabnya jika suatu kota di Indonesia dilakukan lockdown. Dengan kondisi seperti sekarang ini, perekonomian masyarakat mulai menurun. Sektor pariwisata salah satunya mulai menurun yang juga berimbas pada rantai bisnis pendukungnya, seperti persewaan kendaraan, penginapan hotel, kuliner, usaha catering. Pendekatan *physical distance* atau menjaga jarak lebih dikedepankan, supaya ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Aktivitas bertransportasi di Jakarta pasti berpengaruh. Yang biasanya menggunakan transportasi umum, beralih menggunakan kendaraan pribadi. Antrian Panjang pengguna MRT dan Transjakarta. Ojol menjadi pilihan bertransportasi. Sementara aktivitas pusat perbelanjaan, perkantoran, perbankan masih berlangsung normal. Walaupun ada himbauan untuk bekerja di rumah. Kontak dengan publik akan memperbesar risiko penyebaran Covid-19. Mengisolasi diri tidak hanya

untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, bahkan mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia.

Seperti di Jakarta, kebijakan pengurangan layanan transportasi publik. Sementara aktivitas publik tidak banyak berkurang. Kapasitas transportasi umum MRT Jakarta dan Bus Trans Jakarta mengalami pengurangan jam operasional (06.00-18.00), selang waktu (headway setiap 20 menit), kapasitas penumpang 60 orang per kereta atau 360 orang per rangkaian untuk MRT, pengurangan rangkaian kereta dan jumlah bus yang beroperasi. Jika ingin mengurangi interaksi dekat karena padatnya Bus Trans Jakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta, maka sebaiknya menambah kapasitas layanan transportasi publik lebih pantas dilakukan. Kebijakan yang tidak diperhitungkan dengan cermat, pasti akan muncul masalah baru.

Dilematis bagi aktivitas transportasi masyarakat yang berasal dari luar Jakarta. Upaya menggunakan transportasi umum menjadi berkurang. Penggunaan kendaraan pribadi akan cenderung meningkat. Beruntung operasional KRL Jabodetabek tidak mengalami pengurangan. Upaya mencegah terinfeksi virus Corona di KRL Jabodetabek oleh PT KCI sudah dilakukan sejak dini sebelum terbit Protokol di Area dan Transportasi Publik.

Simpul transportasi, seperti bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, stasiun, terminal penumpang harus menjadi perhatian dan halte bus. Pasalnya, simpul transportasi salah satu tempat berkumpulnya warga untuk aktivitas bertransportasi. Terutama terminal penumpang bus dan halte bus yang tertutup harus dalam kondisi bersih.

Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat menginstruksikan bagi penyelenggara terminal penumpang bus benar-benar menjaga kebersihan kawasan terminal.

Para tenaga medis menaiki bus Transjakarta yang disiapkan oleh Pemprov DKI Sabtu (28/3/2020). Foto: Antara-Galih Pradipta



Operator angkutan umum juga diarahkan untuk melakukan hal sama melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan yang akan digunakan. Publik pengguna jasa transportasi umum harus mendapatkan pencerahan berkesehatan dalam transportasi umum.

Termasuk juga pemeriksaan kesehatan awak bus dan penumpang. Terminal sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan harus dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan.

Meniru Vietnam, salah satu kesuksesannya menangkai virus Corona adalah membangun *Mobile Decontamination Chamber (MDC)* yang diterapkan di tempat-tempat umum, seperti stasiun, terminal, mall, perkantoran. Hal ini biasanya diterapkan di *Breeding Farm*, setiap orang yang keluar masuk wajib disinfeksi di MDC. Vietnam merupakan negara pertama yang berhasil mengendalikan, menyembuhkan, dan terbebas dari wabah virus Corona.

Kesehatan selayaknya menjadi aspek yang perlu ditambahkan se-

lain kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi. Tambahan aspek kesehatan diberikan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Pelayanan (SOP) setiap pelaksanaan moda transportasi.

Pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan diri dan berolahraga yang cukup adalah anjuran pemerintah bagi seluruh warga negara dalam upaya menangkai terinfeksi virus Corona.

Menjadi perhatian serius bagi penyelenggara bandara, stasiun, terminal dan pelabuhan juga operator transportasi umum selalu tetap menjaga kebersihan demi kesehatan diri sendiri dan orang lain.

Transportasi Publik Harus Tersedia
Bagaimana dengan layanan transportasi umum di Jakarta? Kebijakan yang diambil pemerintah bukan *lockdown*, tetapi *physical distancing*, yaitu menjaga jarak interaksi. Jadi, layanan transportasi umum harus tetap normal. Menambah kapasitas penumpang

(jadwal keberangkatan ditambah) transportasi umum dengan cara memperkecil jarak antar bus dan kereta (*headway*) perjalanan antar bus dan kereta. Dalam upaya tidak terjadi desak-desakan di halte dan stasiun serta di dalam bus dan kereta. Beberapa halte Bus Transjakarta sudah menerapkan *physical distancing*, seperti Halte Karet Sudirman Koridor 1, Halte Terminal Kampung Melayu, perbatasan Koridor 5 dan 7.

Dalam sehari, menurut hasil studi yang dilakukan JICA (2019) ada sekitar 8 juta pergerakan dari Bodetabek menuju Jakarta. Pengurangan kapasitas transportasi umum (MRT dan Bus Transjakarta) bertujuan efek kejutan bagi warga Jakarta, namun tidak bagi warga Bodetabek. Untung saja KRL Jabodetabek tetap beroperasi normal. Bahkan, KRL Jabodetabek menambah jadwal pemberangkatan kereta dalam upaya mendukung *physical distancing*.

Physical distancing dapat diartikan dengan menahan diri memasuki kerumunan dan membatasi keinginan untuk keluar rumah tanpa



Keberadaan bilik disinfektan portabel di Vietnam dianggap mampu membersihkan bakteri dan virus karena telah menggunakan bahan yang telah dicuci secara khusus. Bilik disinfektan ini kemudian semakin banyak dikenal dan akhirnya viral setelah diunggah oleh seorang pengguna Twitter bernama @LunaOi_VN pada Jum'at (13/03/2020). Inovasi ini merupakan hasil kerjasama antara Institut Kesehatan dan Lingkungan Kerja, Kementerian Kesehatan Vietnam, dengan Universitas Teknologi Hanoi. Vietnam menjadi negara pertama yang berhasil mengendalikan, menyembuhkan, dan terbebas dari wabah virus korona. Untuk itu Indonesia bisa mencontoh langkah Vietnam di atas dengan menyediakan MDC di pusat-pusat keramaian. Foto: akun Twitter @LunaOi_VN

keperluan yang penting. Warga dapat beralih melakukan pekerjaan hingga belajar secara online, serta membatalkan atau menunda rekreasi dan kegiatan lain yang bersifat massal.

Mengurangi berdesakan di dalam transportasi umum, menjaga kebersihan supaya tetap sehat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan umum (bus, kereta, kapal laut, kapal penyerangan, pesawat udara) perlu menambahkan kriteria aspek kebersihan demi kesehatan. Mari mewujudkan transportasi umum tidak hanya aman, nyaman, selamat, akan tetapi sehat.

Transportasi Publik di Negara Lain
Setiap negara memiliki kebijakan berbeda dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah

kita tidak memilih *lockdown* tapi dengan kebijakan *physical distancing* serta dengan pembatasan sosial. Transportasi masyarakat masih terlayani namun dengan pembatasan tertentu dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Yang paling penting angkutan logistik, pangan, dan obat-obatan harus lancar dan terus berjalan. Dalam pengaturan transportasi umum pada saat merebaknya Covid-19 ini, setiap negara juga memiliki kebijakan berbeda. Ada yang mengurangi layanan jam operasi, menutup operasional, tidak mengalami perubahan jam operasi, ada pula yang membatasi lansia menggunakan transportasi umum. Berikut kebijakan dari beberapa negara terkait Covid-19.



Petugas NJ Transit menyemprotkan cairan desinfektan, New Jersey, Amerika Serikat. Foto: gannet-cdn.com

umum untuk sampai ke tempat kerja mereka. Namun terkait *lockdown* di Kota Madrid, layanan dipotong setengah karena sebagian besar masyarakat diwajibkan mengisolasi diri di rumah masing-masing (bekerja di rumah), hanya sebagian kecil masyarakat yang masih harus bekerja ke kantornya (untuk jenis pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah).

Ontario (Kanada). Seiring dengan aturan pemerintah untuk meliburkan sekolah, universitas, dan karyawan di Provinsi Ontario, menyebabkan penurunan jumlah penumpang angkutan umum, maka *Metrolinx* yang menjalankan *GO train*, *GO bus*, *Up Express* melakukan perubahan jadwal pelayanan. Perubahan itu antara lain (1) pengurangan jadwal *GO train*, *GO bus*, *Up Express* terkait dengan pengurangan penumpang akibat *lockdown*. Namun tetap dapat melayani penumpang yang harus tetap bekerja, (2) tidak ada penerapan perjalanan jam sibuk, (3) tidak ada pelayanan *GO train* ke lokasi wisata seperti *Niagara Falls* dan *St Catharines*. Namun rute tersebut masih dapat dilayani oleh *Go Bus*, (4) *GO train* tidak melayani perjalanan ke stasiun yang menuju kota lainnya yang terdampak, (5) tempat duduk penumpang di bus diatur sebagai berikut: tidak boleh duduk di belakang sopir, dan (6) di dalam *GO train*, penumpang harus duduk menyebar, dan tidak boleh dekat pintu.

Mumbai (India). Transportasi umum Mumbai, terutama kereta memiliki jumlah penumpang 8,5 juta penumpang. Pemerintah India saat ini mengambil keputusan untuk menghentikan sementara pelayanan kereta api Mumbai selama beberapa hari, sebagai langkah '*social distancing*' dalam rangka mencegah persebaran Covid-19. Setelah itu, pemerintah juga memiliki opsi terkait operasional *Metro Rail*, *Monorail*, dan transportasi publik lainnya: mendesinfeksi kereta, membatasi jumlah kepadatan penumpang kereta dengan membatasi jarak duduk penumpang, ataupun

INFO UTAMA

menghentikan sementara pelayanan kereta api lokal.

Wuhan (Tiongkok). Pemerintah Wuhan menerapkan kebijakan transportasi umum secara bertahap. Tahap awal adalah penghentian layanan penerbangan dari Wuhan ke provinsi lain di Tiongkok maupun ke luar negeri. Kemudian Wuhan menghentikan layanan kereta dari Wuhan ke kota lainnya, disusul oleh layanan bus, kereta bawah tanah, dan kapal feri. Masyarakat sama sekali tidak boleh keluar rumah tanpa ijin otoritas setempat.

Moskow (Rusia). Pemerintah Rusia menerapkan penghentian pelayanan penerbangan ke luar daerah di Rusia maupun keluar negeri untuk mengurangi kemungkinan masuk dan keluarnya covid-19. Pelayanan transportasi umum di kota Moskow masih berjalan seperti biasa, namun dengan prosedur yang sangat ketat terkait pemeriksaan kesehatan dan kesterilan sarana transportasi umum.

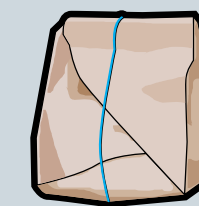
Belanda. Pemerintah Belanda menerapkan aturan sistem belajar online bagi mahasiswa, namun bagi pelajar tetap masuk sekolah seperti biasanya karena pelajar memiliki tingkat kerentanan paling rendah terhadap covid-19. Penduduk usia lanjut dihibau untuk tetap di rumah dan tidak diperkenankan menggunakan transportasi publik, karena penduduk usia lanjut paling rentan terhadap covid-19. Pelayanan angkutan umum di Belanda berjalan seperti biasanya, tidak ada perubahan.

Italia. Pemerintah Italia menutup seluruh penerbangan keluar negeri, menghentikan pelayanan kereta api jarak jauh. Namun untuk transportasi umum dalam kota tetap berjalan seperti biasa dengan batasan-batasan karena seluruh warga kota diminta untuk tidak keluar rumah sama sekali kecuali untuk membeli grocery dan obat dengan ijin otoritas setempat.

Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat



Aksi bagi-bagi nasi bungkus gratis merupakan salah satu wujud kepedulian Ditjen Perhubungan Darat kepada masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah untuk bekerja di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Foto: HMS DJPD/ MAD.



NASI BUNGKUS GRATIS UNTUK PEKERJA SEKTOR INFORMAL

Sebagai wujud kepedulian pemerintah serta bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengadakan aksi berbagi nasi bungkus untuk para pekerja sektor informal, yang terpaksa harus mencari nafkah di luar rumah di tengah merebaknya pandemi Covid-19.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Selasa (31/3) siang membagikan nasi bungkus kepada masyarakat khususnya pekerja sektor informal yang masih bekerja hingga hari ini. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian dari Ditjen Hubdat terhadap banyaknya pekerja yang tidak dapat bekerja dari rumah akibat merebaknya Covid-19.

"Pembagian nasi bungkus ini khususnya untuk bekal bagi para pengemudi ojek online, bajaj, tukang kopi keliling, dan lainnya para pekerja yang masih aktif bekerja. Dalam situasi pandemi seperti ini banyak masyarakat di sekitar kita yang butuh bantuan kita. Hal inilah yang menggerakkan kami untuk peduli dan berbagi. Saat ini para pengusaha warung nasi juga ikut terpuruk ekonominya, ini sekaligus kami membantu membeli makanan dari mereka. Jadi nasinya kami beli dari warung nasi kemudian kami bagikan secara gratis untuk masyarakat," jelas Dirjen Budi.

Meski sudah banyak masyarakat yang pulang ke kampung halamannya, tak dipungkiri masih banyak pekerja sektor informal yang tertahan di ibukota untuk bekerja apalagi yang pendapatannya harian. Saat ini total dana yang terkumpul untuk aksi berbagi nasi bungkus gratis tersebut sejumlah Rp 150 juta. Setiap hari akan disiapkan 200 bungkus gratis selama 2 minggu ke depan.

"Dalam hari ini kami sudah membagikan 200 nasi bungkus dan dibagikan di lingkungan terdekat kami di sekitar Kementerian Perhubungan. Harapan saya setidaknya ini dapat juga membantu masyarakat kurang mampu atau yang mungkin tidak mudik, tetap bertahan dan masih bekerja di tengah situasi ini. Kami juga ingin mendorong masyarakat lainnya yang juga memiliki kepedulian untuk bersama-sama turun tangan membantu para saudara kita dari dua sisi, baik yang berjualan makanan maupun yang masih mencari makan. Kondisi ekonomi saat ini memang sulit tapi harapan kami kita semua bisa bangkit dari cobaan ini," pungkasnya. (*)

Washington (USA). **Metrorail**, Hari Senin – Jumat: kereta beroperasi setiap 12 menit di setiap jalur sepanjang hari. Sistem kereta mempertahankan jam normal, buka mulai pukul 5 pagi. Hari Sabtu, kereta akan beroperasi setiap 12 menit di setiap jalur, dengan layanan dari jam 7 pagi hingga jam 1 pagi (layanan Sabtu normal). Hari Minggu kereta akan beroperasi setiap 15 menit di setiap jalur dengan layanan dari pukul 8 pagi hingga 11.00 malam (layanan Minggu normal).

Metrobus, layanan bus pada hari kerja disamakan dengan operasi pada jadwal tambahan hari sabtu. Jadwal bus akhir pekan tidak berubah.

Selain itu dilakukan disinfektan kereta dan bus, termasuk penggunaan kabut elektrostastik setiap minggu di seluruh armada metro yang terdiri dari 1.200 kereta dan 1.500 bus. Proses elektrostastik mencakup permukaan yang tidak dapat diakses dari dalam kendaraan seperti saluran udara dan kompartemen.

New Jersey (Amerika Serikat). Layanan NJ Transit yang terdiri dari *rail*, *bus*, *light rail*, dan *access link* tetap menyediakan layanan terhadap masyarakat dan menjalankan layanan hari kerja reguler sesuai ketentuan. NJ Transit meningkatkan prosedur pembersihan dan disinfektan di area pegangan tangan, sandaran lengan, area tempat duduk dan toilet. Sesuai dengan anjuran pemerintah setempat, setiap angkutan publik akan didesinfeksi setiap 72 jam.

Jerman. Transportasi publik di Jerman tidak mengalami perubahan

TANPA PENEGAKAN HUKUM, KENDARAAN ODOL MERAJALELA

Merasa mendapat kesempatan akibat penghentian sementara kegiatan penegakan hukum bagi kendaraan ODOL, sejumlah kendaraan ODOL mulai beroperasi di jalan-jalan.

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerapkan penegakan hukum (gakkum) terhadap kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) sejak 9 Maret 2020 silam. Setelah berjalan 2 pekan hingga Kamis (19/3), penindakan truk ODOL telah dilakukan di KM 41 Ruas Tol Jakarta- Cikampek, Pintu Gerbang Tol Karawang Barat, Pintu Gerbang Tol Cikopo, KM 120 B Ruas Tol Cipularang, dan Pintu Gerbang Tol Cileunyi-Jawa Barat. “Total kendaraan yang ditimbang dari 9 Maret lalu, sejumlah 3.956 kendaraan. Jumlah kendaraan yang melanggar sebanyak 1.750 kendaraan atau 44%, sementara yang lulus ditimbang sebanyak 2.206 kendaraan,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi di Kementerian Perhubungan pada Jumat (20/3).

Selain itu, Dirjen Budi mengumumkan bahwa kegiatan gakkum truk ODOL di jalan tol akan dihentikan untuk sementara waktu. “Mengingat begitu luasnya penyebaran virus Covid-19 yang akhir-akhir ini mulai merebak, untuk sementara kegiatan kita hentikan hingga waktu yang belum ditentukan. Kami mohon untuk petugas di lapangan yang sebelumnya memantau ODOL dari Tol Tanjung Priok sampai ke Bandung selama 2 minggu ini untuk menghentikan kegiatannya

karena kami juga harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apalagi dengan kondisi virus Covid-19 yang saat ini kami merasa cukup banyak tantangan yang harus dihadapi petugas di lapangan,” jelas Dirjen Budi.

Dirjen Budi juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah bertugas dan turun ke lapangan untuk memberantas truk ODOL di sepanjang jalan tol Jakarta – Bandung terlebih tugas tersebut dilakukan di tengah pandemi Covid-19. “Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdianya dan dari hasil penindakan beberapa hari ini akan kita lakukan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Dari data awal yang saya sebutkan tadi, masih terdapat beberapa jenis pelanggaran. Yang terbanyak yaitu pelanggaran muatan, disusul oleh pelanggaran dimensi, dan gabungan keduanya (ODOL), pelanggaran dokumen. Salah satu pelanggaran yang cukup banyak juga yaitu pelanggaran alat pemantul cahaya,” urainya.

Selain itu, Dirjen Budi menambahkan di sisi lain ia juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi untuk mengawal kebijakan Zero ODOL. Lebih dalam lagi, Dirjen Budi membahas bahwa pelanggaran ODOL ke

depannya akan dimasukkan dalam poin revisi di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang kini tengah diproses.

Aksi Kendaraan ODOL di Tengah Pandemi Covid-19

Merasa mendapat kesempatan akibat penghentian sementara kegiatan penegakan hukum bagi kendaraan ODOL, sejumlah kendaraan ODOL mulai beroperasi di jalan-jalan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyebut, “Sangat tidak elok sejumlah oknum pemilik barang dan oknum pengusaha angkutan barang memanfaatkan situasi pandemi Covid 19 untuk mengangkut barang melebihi batas yang ditetapkan (*over loading*) dengan kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik (hasil modifikasi) atau *over dimension*. Pada akhirnya dapat menyebabkan terjadi kerusakan

jalan lebih dan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.”

Hal itu sudah terbukti dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Jalur Tegal-Purwokerto tepatnya Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Selasa (31/3/2020). Truk gandeng bermuatan gandum itu melaju dari arah selatan (Banyumas). Truk diduga mengalami kegagalan pengereman akibat muatan lebih (*over loading*), sehingga menabrak tiga motor dan tiga kendaraan roda empat. Korban meninggal dunia 3 orang, sedangkan 4 orang lainnya luka-luka.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 13 Permenkes No 9/2020 mengatur pelaksanaan PSBB, yang antara lain meliputi pembatasan moda transportasi. Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk moda transportasi penumpang, baik umum maupun pribadi, dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpemumpang.

Namun pembatasan itu tidak berlaku untuk lalu lintas kendaraan angkutan logistik atau barang. Karena masyarakat sungguh membutuhkan pangan (makan dan minuman) dan obatan-obatan. Namun tentunya, janganlah pengusaha pemilik barang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi sebesar-besarnya dengan mengorbankan pihak lain.

Di saat wabah virus Corona, sejumlah Unit Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) ditutup sementara waktu. Sejumlah pegawai UPPKB dan Kepolisian yang biasa bertugas di UPPKB diperbantukan ke sejumlah Terminal Tipe A untuk membantu pengawasan penumpang bus

umum dalam hal menangkai virus Corona menyebar.

Di tengah mobilitas kendaraan pribadi yang berkurang, kendaraan barang masih tetap melintas di jalan raya. Pemandangan yang berbeda terjadi di jalan Tol pasca penutupan sejumlah UPPKB di jalan nasional, populasi mobilitas truk *over dimension* *over loading* (ODOL) bertambah. Bisa jadi tingkat kerusakan jalan di masa pandemi Covid-19 ini lebih tinggi dibanding hari biasanya.

Direktur Prasarana Ditjenhubdat Risal Wasal mengatakan, ada lima permasalahan ODOL di lapangan adalah (1) sosialisasi masih belum maksimal di pelabuhan; (2) akses langsung tol tanpa melewati UPPKB; (3) belum semua UPPKB menerapkan sanksi transfer muatan atau dilarang meneruskan perjalanan; (4) Penegakan Hukum (Gakkum) pasal 277 belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik pusat maupun daerah; dan (5) Penegakan hukum di jalan tol belum optimal dilaksanakan.

Pelarangan ODOL di pelabuhan Pelarangan kendaraan ODOL di pelabuhan penyeberangan sudah dilaksanakan minimal dapat menertibkan kendaraan ODOL yang melintas dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan baru sebagian pelabuhan dari Jawa ke Kalimantan dan Sulawesi.

Hanya memang kendalanya nanti akan stag di pelabuhan penyeberangan, jika kendaraan angkutan barang menyeberang di waktu yang hampir bersamaan (jam sibuk). Akan sangat rawan konflik di lapangan, jika belum diantisipasi pengaturan terhadap kendaraan ODOL dikeluarkan dari pelabuhan dan tidak boleh parkir di pelabuhan penyeberangan ataupun sekitar pelabuhan yg mengganggu kelancaran lalu lintas. (*)

Sejumlah kendaraan yang obesitas melintas di jalan tol. Selain rentan patah as, kendaraan yang kelebihan muatan juga berjalan terlalu lambat, di bawah batas minimal kecepatan di jalan tol yaitu 60 km/jam.

Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi maupun muatan akan ditindak tegas. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menegaskan bahwa pihaknya akan terus menggaungkan “Indonesia Bebas Over Dimension dan Over Loading (ODOL) 2023”.

Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Dirjen Budi usai kecelakaan tunggal yang terjadi pada 9 Februari lalu di tol Cipali KM 123.

“Ditjen Hubdat akan mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran muatan lebih dan/ atau ukuran lebih. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Korlantas Polri maupun Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sementara terkait pencegahan truk ODOL di jalan tol, kami akan koordinasi dengan Jasa Marga dan Badan Usaha Jalan Tol untuk pengawasan dan penindakan pelanggarannya,” kata Dirjen Budi. Ia juga menjelaskan bahwa Kemenhub yakin akan dapat memberantas ODOL sepenuhnya sesuai target yakni pada tahun 2023 mendatang.

Menanggapi pernyataan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang meminta penindakan tegas terhadap kendaraan ODOL, Dirjen Budi mengapresiasi permintaan Kadin tersebut.

“Kami sepakat dengan pernyataan Kadin bahwa keselamatan adalah hal yang utama dalam berlalu lintas. Tentu tidak hanya kepada para pelaku logistik saja, beban untuk memberantas ODOL ini perlu sinergi dari beragam pihak mulai dari Kepolisian,



Kegiatan penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL di jalan tol. Petugas dari Ditjen Perhubungan Darat memberi aba-aba kepada pengemudi truk untuk ditimbang menggunakan alat penimbangan portable di ruas jalan tol Kanci - Pejagan (10/3/2020). Foto: HMS DJPD/MAD

MENUJU INDONESIA BEBAS ODOL 2023

Meski untuk sementara kegiatan penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL di jalan tol dihentikan demi menekan penyebaran Covid-19, namun semangat mewujudkan Indonesia Bebas ODOL pada 2023 terus menerus digaungkan.

pengusaha, pemilik kendaraan, maupun Pemerintah. Bahkan peran masyarakat pun amat diperlukan untuk bersama-sama memberantas ODOL dengan serius,” terang Dirjen Budi.

Keseriusan Kementerian Perhubungan dalam memberantas ODOL ini terlihat ketika satu persatu pelanggar ODOL di berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mulai diproses di meja hijau.

“Ke depannya kami akan semakin tegas. Siapa yang melanggar dimensi maupun muatan akan kami pidanakan. Kami akan maksimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kami di daerah. Mereka akan melakukan penyidikan terhadap kendaraan yang ODOL. Jadi nanti dari hasil penyidikan mereka, denda ini dapat dikenakan tilang terhadap karoseri atau kepada pengusahnya. Intinya kami dari Ditjen Hubdat akan optimalkan kinerja dan lakukan koordinasi terus menerus demi mewujudkan Indonesia Bebas ODOL pada tahun 2022,” pungkash Dirjen Budi. (*)

LANGKAH PREVENTIF DAN REPRESIF BERANTAS ODOL

Dalam mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar ODOL. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat secara Umum mempersiapkan 2 langkah, yakni preventif dan represif dalam memberantas ODOL. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, “Saya sudah melakukan koordinasi dengan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di masing-masing daerah untuk melaksanakan beberapa kegiatan baik preventif maupun represif untuk memperkuat penanganan ODOL.”

Tindakan preventif tersebut akan dilakukan bertahap mulai dari hulu hingga ke hilir. “Kepala BPTD di 25 wilayah se-Indonesia agar mengundang dealer kendaraan truk untuk tidak membuat rancang bangun truk serta memperjualbelikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuannya,” lanjut Dirjen Budi.

Pihaknya juga akan melakukan pengecekan secara langsung ke dealer atau tempat-tempat penjualan truk untuk mengawasi truk yang tidak sesuai dengan rancang bangunnya.

Selain itu Dirjen Budi menambahkan, “Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan pembinaan kepada para karoseri maupun operator kendaraan truk apabila mempunyai truk yang tidak sesuai agar segera dinormalisasikan.”

Tidak hanya mempersiapkan tindakan preventif, langkah-langkah represif juga dilakukan

Ditjen Hubdat dalam menangani pelanggar ODOL. “Nantinya apabila masih dijumpai karoseri maupun dealer yang membuat atau menjual kendaraan truk yang tidak sesuai ketentuan akan diterapkan pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 seperti yang sudah diterapkan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau-Kepulauan Riau dan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat,” jelas Dirjen Budi sembari menjelaskan langkah represif yang dilakukan pihaknya.

Menurut Dirjen Budi bukan hanya menerapkan pasal 277, pihaknya juga akan melibatkan kepolisian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan truk ODOL agar segera ditindak tegas secara hukum.

Untuk memperkuat penanganan ODOL, Dirjen Budi meminta seluruh Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang bertugas harus bertindak tegas agar tidak meloloskan mobil-mobil yang kelebihan muatan maupun dimensi.

“Kalau masih didapati ada kendaraan ODOL para petugas akan melakukan penindakan secara tegas dengan penilangan juga menurunkan muatan kendaraan-nya disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” ucap Dirjen Budi.

Dirjen Budi berharap dengan adanya pelaksanaan normalisasi dan tindakan yang menekan terjadinya pelanggaran ODOL dapat memberi efek jera kepada pelanggar sehingga pada tahun 2022 mendatang Indonesia Zero ODOL akan tercapai. (*)

TRUK ODOL DILARANG MASUK PELABUHAN PENYEBERANGAN

Kendaraan ODOL tidak bisa dibiarkan masuk ke pelabuhan penyeberangan karena menimbulkan kerugian yang cukup besar, di antaranya adalah kerusakan *rampdoor* dan *mobile bridge* lebih cepat, serta kapasitas kapal jadi berkurang karena ada penambahan dimensi kendaraan.



Per 1 Mei 2020, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi tak hanya melarang truk ODOL masuk ke pelabuhan penyeberangan, tetapi akan mengembalikannya sampai ukurannya dinormalisasikan. Hal tersebut disampaikan saat melakukan pemantauan pelaksanaan PM 103 tahun 2017 tentang pengaturan dan pengendalian kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten pada Sabtu (22/2).

“Selain itu, kendaraan yang melebihi kapasitas tentunya akan mengancam keselamatan karena mengganggu stabilitas kapal saat berada di tengah laut,” ujar Dirjen Budi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi meminta kepada pihak ekspedisi untuk jangan memikirkan bisnis saja, tetapi pikirkan juga aspek keselamatan. Kalau kapal diberi

beban muatan truk dengan tonase atau kapasitas yang tidak sesuai dengan ketentuan akan membahayakan seluruh isi kapal dan juga mengakibatkan kerusakan pada kapal.

Ia pun mengaku pihaknya terus mendata para pelaku yang tidak comply dengan regulasi yang ada. Pada 1 Mei 2020 mendatang ketika tahap sosialisasi dan edukasi selesai, pemerintah tidak hanya akan dilakukan penindakan, tetapi juga truk ODOL akan dikembalikan.

“Kita akan mengembalikan kepada marwah yg sebenarnya karena regulasi tentang kapasitas truk ini sudah ada dan sudah jelas. Hanya saja, regulasi ini belum diterapkan oleh semua pihak dan penertibannya belum konsisten,” ujar Dirjen Budi.

Sementara itu, Freddy dari PT. Munic Line menyatakan, “ODOL membahayakan keselamatan. Kalau beratnya lebih dari yang

ditentukan, kapal akan terganggu stabilitasnya. Kalau stabilitasnya terganggu, keselamatan menjadi sangat riskan”.

Di sisi lain, Capt. Solikin dari pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengatakan, “Masih banyak kendaraan yang melebihi kapasitas masuk. Kalau ini terus menerus terjadi, movable bridge bisa mengalami kerusakan parah dan aspek lain pun bisa terganggu sehingga menciptakan dampak yang sangat besar. Kapal-kapal pun tidak bisa operasi karena stuck. Padahal sebetulnya dimensi truk sudah dirancang dengan pengukuran sedemikian rupa namun pada praktiknya masih belum konsisten”.

Dirjen Budi pun mengatakan, “Besar harapan saya kepada semua pihak dapat untuk dapat bekerja sama membentuk ekosistem yang baik terutama di transportasi darat dan juga penyeberangan.” Yang diutamakan adalah keselamatan. Permasalahan ODOL ini tidak hanya merugikan secara materi tapi juga menyangkut nyawa manusia.(*)



Truk ODOL Dilarang Melintas Jalan Tol Jakarta-Bandung

Kementerian Perhubungan bersama Jajaran Korps Lalu Lintas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan operasi pemeriksaan dan penindakan truk kelebihan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di Gerbang Tol Tanjung Priok 1, Jakarta Utara, Senin (9/3/2020).
Foto: HMS DJPD/MAD

TRUK ODOL DILARANG MELINTAS JALAN TOL JAKARTA- BANDUNG

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL dilakukan di jalan tol sepanjang ruas jalan tol Tanjung Priok – Bandung terutama di gerbang tol yang terindikasi banyak kendaraan ODOL yang melintas.

Mulai Senin (9/3/2020) dilakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL di jalan tol sepanjang ruas jalan tol Tanjung Priok – Bandung terutama di gerbang tol yang terindikasi banyak kendaraan ODOL yang melintas. Dalam kegiatan Pengawasan, Pelarangan, dan Penindakan Hukum Kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) di Jalan Tol Tanjung Priok- Bandung.

“Pada tanggal 24 Februari 2020 dicapai kesepakatan bersama antara Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Kepala Kepolisian RI, Organda, Aptrindo, dan

Asosiasi-asosiasi Industri, yaitu pertama, kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023. Kedua, kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) untuk ruas jalan tol Tanjung Priok sampai ke Bandung akan diberlakukan mulai tanggal 9 Maret 2020 atau hari ini. Ketiga, pelarangan kendaraan ODOL di pelabuhan penyeberangan tetap berjalan, yaitu tanggal mulai tanggal 1 Februari 2020 diberlakukan tilang dan mulai tanggal 1 Mei 2020 dilakukan pelarangan naik ke atas kapal penyeberangan bagi kendaraan ODOL. Keempat, toleransi kelebihan muatan mobil barang yang mengangkut bahan pokok dan barang penting tetap berlaku

di jalan nasional,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubdat Kemenhub) Budi Setiyadi dalam pengarahannya yang diberikannya pada acara tersebut.

Untuk melaksanakan poin kedua yang disampaikan Dirjen Budi tersebut, maka dilakukan pengawasan dan penegakan hukum di gerbang tol di sepanjang ruas jalan tol Jakarta – Bandung. Dari 187 gerbang tol, pengawasan diprioritaskan di 26 gerbang tol yang terindikasi banyak kendaraan ODOL melintas.

Dari 26 gerbang tol tersebut, di 13 gerbang tol yaitu gerbang tol Tanjung Priok 1, Koja, Kebon Bawang, Semper, Cakung, Rorotan, Cibitung, Cikarang Barat, Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Padalarang, dan Cileunyi akan dilakukan pengawasan over dimension dan over load menggunakan alat ukur dan alat timbang kendaraan portable.

Sedangkan di 13 gerbang tol lainnya yaitu gebang tol Gedong Panjang, Angke, Jelambar, Kapuk, Pluit, Ancol, Jembatan Tiga, Cikarang Timur, Kalihurip, Tol Timur, Jatiluhur, Sadang, dan Cileunyi dilakukan pengawasan over dimension.

Senada dengan pernyataan Dirjen Budi sebelumnya, Direktur Prasarana Transportasi Jalan M. Risal Wasal menjabarkan bahwa pengawasan dilakukan 24 jam dibagi dalam 4 shift, dengan personel dari Korlantas, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Biro Korwas PPNS Bareskrim, POM TNI AD, Ditjen Hubdat, Ditjen Bina Marga, BPJT, BPTJ, PT. Jasa Marga, PT. Cipta Marga Nusaphala Persada, PT. Hutama Karya, PT. Jasa Raharja, Dishub Provinsi DKI Jakarta, Dishub Jawa Barat, dan Dishub Kab/ Kota sepanjang jalan tol Jakarta – Bandung.

“Di samping pengawasan di gerbang tol, dilakukan juga pengawasan di rest area KM 57A dan KM 62B oleh pihak kepolisian. Kendaraan yang melanggar ODOL akan ditilang. Selain ditilang, di beberapa lokasi kendaraan yang melanggar juga diperintahkan putar balik atau dikeluarkan dari jalan tol. Selain pengawasan dan penegakan hukum, juga dilakukan sosialisasi melalui pembagian flyer di gerbang tol lainnya pada jalur Jakarta - Bandung, gerbang tol arah timur dan barat, kawasan industri, dan kawasan pelabuhan, serta pemasangan banner dan spanduk di rest area jalan tol dan juga sosialisasi melalui media sosial dan media lainnya,” lanjut Risal.

Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi menjelaskan ada beberapa langkah yang sudah dilakukan di lingkungan Kementerian Perhubungan. “Kita sudah mulai melaksanakan normalisasi kendaraan dan kita harapkan akan terus dilakukan karena bersamaan dengan itu kita juga melakukan kebijakan di tahun 2020 tidak ada lagi uji kir yang masih menggunakan buku kir. Semenjak 2020 buku kir sudah kita ganti dengan kartu, jadi kalau masih pakai buku kir apalagi di wilayah DKI Jakarta sudah pasti palsu. Kalau mau melakukan uji kir, jangan pakai biro jasa karena biro jasa itu hanya menguntungkan operator dan menguntungkan biro jasanya karena mobilnya tidak dibawa ke tempat uji kir tapi bukunya tetap ada,” imbau Dirjen Budi.

Selanjutnya Dirjen Budi menyampaikan bahwa persoalan buku kir palsu ini juga sudah ditemukan jalan keluarnya.



Menurutnya untuk di Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini sudah bisa sistem online dan dengan pembayaran langsung ke bank. “Artinya tidak ada lagi pungli di tempat uji kir. Saya jamin itu karena saya sudah melihat sendiri. Kami juga sudah menyiapkan manakala pengusaha melakukan normalisasi kendaraan kami sudah menyiapkan regulasi yang tidak perlu menggunakan SRUT lagi tapi langsung dilakukan uji kir di Dinas Perhubungan. Kalau yang dimensi truknya lebih sekarang saya mengajak untuk menormalisasi kendaraan sebagaimana Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB). Setiap truk yang dibuat ada SKRB nya. Tapi oleh karoseri sering ditambah

tingginya atau dimensinya,” ucap Dirjen Budi.

Dirjen Budi juga menekankan bahwa bersama- sama dengan pemangku kebijakan lainnya akan memulai perjalanan Menuju Indonesia Bebas Kendaraan Kelebihan Dimensi dan Kelebihan Muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 1 Januari 2023. Hal ini telah disepakati pada pertemuan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Kapolri yg diwakili Korlantas Polri, Organda, Aptrindo, dan Asosiasi Industri/Komoditi.

“Di luar jalan tol, 7 komoditas yang dikecualikan masih boleh melintas tapi tidak boleh lebih dari 50% daya muatannya. Ini saatnya kita memulai membuktikan kepada masyarakat

dan operator logistik bahwa kita serius untuk memberantas ODOL,” tegas Dirjen Budi.

Melalui kesempatan yang sama, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahardian menyatakan bahwa ODOL memang masalah lama. “Ada beberapa hal mengapa kita bersikeras masalah ODOL ini, salah satunya adalah sebentar lagi kita akan banyak koneksi dengan jaringan jalan (negara) tetangga kita. Penting sekali kalau kita mengharmonisasi peraturan dan penerapan beban di jalan. Over Loading ini multisektor dan kita sudah banyak pemikiran bagaimana cara menekan biaya logistik tanpa ODOL, salah satunya multi-axle,” jelasnya.

Selain biaya logistik dan beban jalan, permasalahan ODOL lainnya yang dihadapi Indonesia adalah

kecelakaan yang ditimbulkan dari truk ODOL. Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam acara tersebut menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung pemberantasan ODOL terlebih karena dampak ODOL adalah kecelakaan lalu lintas.

“Saya mendukung kegiatan pemberantasan ODOL di jalan tol. Apa yang kita lakukan hanya melaksanakan regulasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi apa yang kita kerjakan memperkuat kembali komitmen kita untuk menjalankan beberapa regulasi yang sudah ada sebelumnya. Kurun waktu 2019 data pelanggaran lalu lintas yang terjadi sekitar 1.300.000, dan pelanggaran 136.000 atau 10% dilakukan oleh kendaraan yang kelebihan kapasitas dan dimensi tersebut. Dan awal dari pelanggaran di sini adalah perlambatan di jalan tol dan ruas-ruas jalan arteri. Inilah yang menyebabkan kecelakaan massal dan fatal,” kata Istiono.

Oleh karena itu menurut Istiono, pelanggaran ODOL harus dikikis dari awal. “Antara Perhubungan dan Kepolisian tentunya sinergi untuk merealisasi dan melakukan penindakan secara tegas ke depan supaya penertiban ODOL bisa lebih baik. Tindakan sanksinya untuk Over Dimensi itu melanggar aturan pidana pasal 277. Itu hukumannya lebih kurang kurungan 1 tahun kemudian denda Rp24 juta. Saya berharap pengusaha tidak berusaha menambah dimensi dari kendaraan,” tambah Istiono.

Dalam acara tersebut hadir pula Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Polana B. Pramesti, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo, Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Edy Junaidi, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kadishub Provinsi Jabar Heri Antasari, dan Direksi CMNP Joko Sapto.(*)



1 Direktur Jenderal Perhubungan Darat bersama Korlantas Polri memeriksa dokumen kendaraan, (9/3/2020). Foto: HMS DJPD/MAD

2 Direktur Jenderal Perhubungan Darat menyampaikan arahan dalam kegiatan penindakan dan penegakan hukum kendaraan ODOL, (9/3/2020). Foto: HMS DJPD/MAD



3 Petugas memantau hasil pemeriksaan berat dan dimensi kendaraan di Gerbang Tol Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (9/3/2020). (KONTAN/Baihaqi)

4 Petugas mengarahkan truk untuk pemeriksaan berat dan dimensi kendaraan di Gerbang Tol Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (9/3/2020). (KONTAN/Baihaqi)

Pemerintah menetapkan Pelarangan Angkutan Mobil Barang yang Over Dimension and Over Load atau ODOL akan berlaku penuh mulai awal 2023. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat koordinasi terkait ODOL bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Korlantas Polri, Kementerian Perindustrian, dan stakeholder terkait di Jakarta, Senin (24/2/2020).

“Kami mengadakan rapat koordinasi untuk mencari solusi. Di satu sisi kita punya keinginan untuk menegakkan aturan ODOL, tetapi di sisi lain kita sedang menghadapi masalah ekonomi akibat adanya wabah Virus Corona, dan isu lainnya yang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Oleh karenanya kita memberikan toleransi sampai akhir 2022, dan pada 1 Januari 2023 berlaku penuh,” ucap Menhub Budi.

Menhub menambahkan, penundaan pemberlakuan ODOL secara penuh ini karena adanya permohonan dari para pelaku usaha untuk meminta tenggat waktu untuk menyesuaikan diri sebelum aturan tersebut benar-benar ditegakkan. Selain itu, Pemerintah juga ingin meningkatkan produktivitas dari Tanjung Priok sebagai pusat logistik nasional yang melayani 60% logistik Indonesia.

Namun demikian, Menhub menjelaskan, untuk ruas jalan tol tertentu aturan pelarangan ODOL ini akan mulai diberlakukan saat ini. Ruas jalan tol tersebut yaitu jalan tol dari Tanjung Priok sampai ke Bandung. Termasuk pelarangan angkutan ODOL masuk ke pelabuhan Penyeberangan.

“Jadi (jalan tol) Tanjung Priok – Jakarta – Cikampek – Bandung tetap diberlakukan pelarangan ODOL. Teknisnya apakah akan



PELARANGAN ODOL BERLAKU PENUH AWAL 2023

Penundaan pemberlakuan ODOL secara penuh ini karena adanya permohonan dari para pelaku usaha yang meminta tenggat waktu untuk menyesuaikan diri sebelum aturan tersebut benar-benar ditegakkan.

diberlakukan hari ini atau minggu depan, akan segera disiapkan,” tegas Menhub.

Pada masa tenggat ini, Menhub meminta kepada pelaku usaha

untuk mempersiapkan diri jelang diberlakukannya aturan pelarangan ODOL secara penuh di awal 2023, diantaranya dengan tidak membeli mobil-mobil baru dengan kualifikasi ODOL. Menhub

mengungkapkan, Kemenhub juga akan melakukan pembenahan seperti uji KIR, termasuk mulai mengoptimalkan angkutan alternatif pengangkut barang selain truk, seperti kapal ro-ro dan kereta api.

Pada kesempatan yang sama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut para pelaku usaha siap mendukung terkait rencana pemberlakuan aturan larangan angkutan ODOL pada Januari 2023.

Sebagai informasi, hingga November 2019 hasil pengawasan angkutan logistik di 73 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang yang dikelola Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, tercatat sebanyak 2.073.698 kendaraan

masuk UPPKB, dimana sebanyak 39% atau sebanyak 809.496 kendaraan yang melanggar. Adapun pelanggaran terbanyak terdapat pada daya angkut yaitu sebesar 84,43%.

Kemenhub sangat concern dengan masalah ODOL khususnya terkait aspek keselamatan. Karena telah banyak dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan akibat Angkutan ODOL. Diantaranya : Angkutan ODOL menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan Raya, polusi udara tinggi, Penyebab kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan dan lain sebagainya.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang,

Korlantas Polri, dan sejumlah asosiasi seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dan sejumlah pihak terkait lainnya. (*)

SIAPKAN LANGKAH STRATEGIS DENGAN RAKORNIS

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat diharapkan dapat semakin menguatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait dengan pengambilan kebijakan ataupun penyelarasan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Seluruh Indonesia Tahun 2020, di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, pada 2-3 Maret 2020. Acara yang dihadiri oleh Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan untuk menentukan arah kebijakan sektor transportasi darat.

Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono, dalam keterangannya di hadapan wartawan mengatakan, “Kita bersama-sama dengan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat beserta para operator dan pelaku usaha dengan adanya pelaksanaan kegiatan Rakornis ini, baik angkutan jalan maupun ASDP dapat menjadi tempat yang sehat, selamat, dan aman bagi penggunaannya.”

Adapun pada acara Rakornis Ditjen Hubdat 2020 kali ini mengangkat tema, “Penguatan Sinergi Stakeholder Transportasi Darat Untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden RI”.

Sehubungan dengan kegiatan Rakornis tersebut, Direktur

konsolidasi dan kaji ulang berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis Perhubungan Darat untuk dapat dilaksanakan dengan optimal dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang perhubungan darat yang lebih baik di pusat maupun di daerah.”

Di dalam Rakornis ini, Dirjen Budi menyampaikan 8 topik utama yang akan menjadi pembahasan selama Rakornis yang berlangsung sejak 2-3 Maret 2020 antara lain:

- Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
- Penertiban Over Dimension dan Over Loading (ODOL);
- Penyederhanaan Sistem Perizinan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (OMNIBUS Law);
- Permasalahan Distribusi Logistik Nasional yang mempengaruhi disparitas harga;

- Pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan TIK Bidang Perhubungan Darat;
- Peningkatan tata kelola (de-birokratisasi dan deregulasi) Ditjen Perhubungan Darat;
- Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat.

Pameran Kendaraan Listrik

Lanjutnya, dalam acara tersebut Dirjen Budi menambahkan pada Rakornis tahun ini konsep acaranya sedikit berbeda dengan Rakornis tahun sebelumnya, “Pada acara Rakornis tahun 2020 ini acara dibuat semeriah mungkin dengan diadakannya pameran yang menampilkan produk serta alat terkini di sektor transportasi darat oleh masing-masing



Kain Ulos
Kementerian Perhubungan menerima ungkapan terimakasih dan penghargaan dari Masyarakat Adat Toba atas dukungan infrastruktur di kawasan Danau Toba pada rangkaian kegiatan Rakornis Perhubungan Darat, Jakarta (2/3/2020). Foto: HMS DJPD/AP



Tesla
Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono, didampingi Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyaksikan pameran kendaraan listrik pada rangkaian kegiatan Rakornis Perhubungan Darat (2/3/2020). Foto: HMS DJPD/AP

Truk Over Dimensi
Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono, bersama Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, serta pejabat terkait lainnya berfoto bersama usai melakukan pemotongan kendaraan truk yang over dimensi pada rangkaian kegiatan Rakornis Perhubungan Darat, Jakarta (2/3/2020). Foto: HMS DJPD/AP



direktorat dan mitra kerja Ditjen Hubdat di sektor transportasi darat. Selain itu saya bersama Bapak Sekjen tadi sempat berkeliling mencoba dan melihat mobil dan motor listrik yang juga dipamerkan.”

Ia mengatakan, “Tujuan diadakan pameran kendaraan listrik tersebut sebagai langkah pemerintah dalam mendukung penuh dengan adanya kebijakan percepatan penggunaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan serta kemajuan terwujudnya pelaksanaan kendaraan listrik yang diamanatkan Perpres 55/2019.”

Menurutnya, hal ini disebabkan adanya tuntutan yang semakin besar akan kendaraan yang ramah lingkungan untuk mengurangi polusi yang telah menjadi permasalahan di beberapa kota besar, terutama Jakarta.

Dirjen Budi berharap, “Pelaksanaan Rakornis ini semakin dapat menguatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait dengan pengambilan kebijakan ataupun penyelarasan pembangunan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,” kata Dirjen Budi.

Selain itu, Ia menegaskan perlunya memperkuat (revitalisasi) kapasitas institusional dalam pelaksanaan tupoksinya agar dapat terwujud institusi yang lebih kuat dan lebih baik dalam melayani masyarakat serta ketanggapan terhadap isu dan tantangan di bidang transportasi darat baik di lingkup sektoral maupun nasional.

Selain pameran kendaraan listrik, dalam rangkaian Rakornis Hubdat 2020 ini Dirjen Budi mengatakan bahwa pihaknya akan segera berbenah dan bersiap menyambut Angkutan Lebaran. Saat ini Kemenhub tengah menjalin kerja sama dengan Google untuk membantu pemudik mendapatkan informasi perjalanan yang terbaik. “Tahun ini kami akan bekerja sama dengan Google terkait peta mudik yang lengkap dan yang pasti dapat membantu perjalanan masyarakat lebih selamat dan nyaman,” jelas Dirjen Budi. (*)

Dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan, Senin (2/3/2020) pagi dilakukan peluncuran 2 aplikasi baru yakni Digitalization Passenger System (Dipass) dan Ferizy.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Gede Pasek Suardika serta Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan peluncuran kedua sistem aplikasi tersebut secara simbolis dalam rangkaian acara Rakornis Ditjen Hubdat 2020 di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta.

“Dalam aplikasi Ferizy yang merupakan wadah pembelian tiket ferry di lintasan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk secara online. Mulai 2 Maret 2020 ini, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan kebijakan penjualan tiket ferry di keempat lokasi tersebut secara online. Pengguna kini hanya tinggal mengakses laman www.ferizy.com,” jelas Dirjen Budi sembari menerangkan.

Dalam keterangan yang dirilis oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tertulis bahwa pengguna jasa yang membeli tiket via Ferizy akan mendapat banyak keuntungan. Pertama, memperoleh kepastian terkait jadwal kapal sehingga pengguna jasa dapat merencanakan waktu keberangkatan dengan lebih efisien dan nyaman karena antrean lebih tertib. Kedua, kapasitas pelabuhan menjadi lebih terkendali karena terdistribusi dengan baik (Port Capacity Management), di mana terdapat kuota tiap jamnya, sehingga waktu tunggu di pelabuhan menjadi lebih terukur. Dan, ketiga, pencatatan manifest untuk data asuransi yang menjadi hak pengguna jasa semakin akurat.



Kanan: Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono disaksikan oleh Dirjen Perhubungan Darat melakukan pemotongan kendaraan over dimensi pada acara Rakornis Perhubungan Darat, Jakarta (2/3/2020). Foto: HMS DJPD/MAD

Kiri: Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, didampingi Direktur Prasarana Transportasi Jalan Risa Wasal menyaksikan pengoperasian alat tap on gate pada peluncuran aplikasi Dipass dan Ferizy, di sela rangkaian kegiatan Rakornis Perhubungan Darat, Jakarta (2/3/2020). Foto: HMS DJPD/AP

PELUNCURAN APLIKASI DIPASS DAN FERIZY

Digitalization Passenger System (DIPASS) adalah sebuah sistem e-ticketing untuk bus. Sedangkan Ferizy adalah layanan e-ticketing untuk angkutan penyeberangan. Kedua aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan pada masyarakat yang akan menggunakan jasa bus maupun penyeberangan.

Dalam layanan e-ticketing, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) juga telah menambah channel pembayaran, dimana tidak hanya melalui transfer bank, tetapi juga melalui Finpay serta melalui gerai retail modern. Adapun fasilitas vending machine yang tersedia di pelabuhan saat ini masih dapat digunakan untuk membeli tiket khusus penumpang pejalan kaki.

Layanan pembelian tiket berbasis elektronik pada Ferizy ini dihadirkan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai upaya digitalisasi serta

peningkatan layanan kepada pengguna jasa yang memberikan kemudahan dalam membeli tiket.

“Mulai 1 Maret 2020, bagi penumpang yang mau menyeberang di Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk tidak harus membeli tiket di loket tapi sudah bisa online dengan memesan di website www.ferizy.com. Dengan online lebih mudah, cepat, akurat, dan mempermudah kita dalam mencatat manifestnya,” tambah Dirjen Budi dalam keterangannya.

Tak hanya memperkenalkan laman www.ferizy.com, ada pula peluncuran Digitalization Passenger System (Dipass) yakni sebuah sistem e-ticketing yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubdat. “Dipass ini diperuntukkan bagi tiap aplikator, maupun PO bus yang belum memiliki sistem e-ticketing mandiri. Saat ini yang sudah bergabung sebanyak 35 operator. Sampai dengan Lebaran kita harapkan semakin banyak operator yang bergabung,” kata Dirjen Budi.

Untuk saat ini bus yang tergabung dalam Dipass sudah mencapai lebih dari 100 armada meski sementara ini masih berada di Pulau Jawa saja. “Rata-rata armada yang belum bergabung itu karena sudah punya aplikasi sendiri tapi yang belum punya aplikasi ini sudah kami himpun dalam aplikasi Dipass. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi Dipass di ponsel masing-masing sebelum menggunakannya,” ucap Dirjen Budi. (*)



PEMOTONGAN KENDARAAN OVER DIMENSI

Ketegasan Kementerian Perhubungan dalam pemberantasan ODOL diperkuat dengan pemotongan truk yang melanggar ketentuan dimensi pada rangkaian acara Rakornis Perhubungan Darat (2/3/2020). Truk tersebut sebelumnya dengan inisiatif sendiri ingin menormalisasi kendaraannya.

“Ini adalah contoh yang baik bagi operator maupun para pemilik truk yang ODOL lainnya karena memiliki kesadaran yang tinggi. Normalisasi adalah untuk kepentingan pengusaha sendiri, kalau kendaraannya tidak normal, dimensinya berlebih, kerugiannya mereka tidak akan bisa lagi melakukan uji berkala karena kir sekarang kita sudah pakai kartu dan alatnya tidak akan bisa kalau dimensinya lebih sehingga tidak akan lolos uji berkala. Maka saya mendorong silahkan yang sudah terlanjur dimensinya tidak sesuai untuk menormalkan kembali dan saya akan bantu SRUT nya untuk uji kir berikutnya,” jelas Dirjen Budi usai menyaksikan pemotongan truk ODOL tersebut.

Pemotongan truk yang melebihi batas dimensi tersebut dilakukan oleh Sekretaris

Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Gede Pasek Suardika, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B Pramesti, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, para mantan Dirjen Perhubungan Darat, serta perwakilan asosiasi di depan Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta.

Senada dengan Dirjen Budi, Sekjen Djoko Sasono berpendapat bahwa normalisasi truk ini untuk memperketat peraturan perundang undangan. “Pemotongan ini dalam rangka membangun optimisme bahwa di jalan semakin selamat dan tentunya dengan hasil seperti ini diharapkan akan nanti mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Memang ada satu dialog yang sampai saat ini terus kita lakukan, akan tetapi memang kita meyakini bahwa upaya ini akan memberikan suatu pasar keuntungan yang besar. Apabila kita memperhatikan secara seksama hasilnya akan luar biasa,” demikian disampaikan Sekjen Djoko Sasono. (*)

ANGKUTAN ANTARMODA PENDUKUNG BANDARA YIA

Dengan adanya angkutan antarmoda ini diharapkan ada konektivitas antara Bandara YIA dengan KSPN Borobudur, sebagaimana kebijakan pemerintah dan arahan Presiden, KSPN super prioritas harus didukung penuh.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya operasional penuh penggunaan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) serta untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat beserta instansi terkait lainnya melaksanakan dukungan angkutan antarmoda.

“Dengan adanya angkutan antarmoda ini diharapkan ada konektivitas antara Bandara YIA dengan KSPN Borobudur,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, ketika meresmikan Angkutan Antarmoda Bandara YIA dan KSPN Borobudur di Sleman City Hall, Yogyakarta (30/1).

Dirjen Budi melanjutkan, “Sebagaimana kebijakan pemerintah dan arahan Presiden, KSPN super prioritas harus didukung penuh.” Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 9 milyar pada tahun ini untuk mensubsidi angkutan antarmoda ini. “Kita harapkan nanti tarif DAMRI sekitar Rp 25.000,- dari Kota Yogyakarta ke Bandara YIA,” katanya.

“Untuk menarik minat masyarakat menggunakan angkutan antarmoda ini, selain subsidi, perlu juga membangun kepercayaan masyarakat bahwa angkutan ini ada terus,” kata Dirjen Budi. “Menhub menekankan bahwa headway jangan lebih dari 30 menit,” lanjutnya. Namun pihaknya dapat mengupayakan sehingga headway bisa 20 menit. Headway adalah jeda waktu keberangkatan antara sebuah armada dengan armada berikutnya.

Terdapat 2 (dua) rute Dukungan Angkutan Antarmoda untuk Bandara YIA yaitu sebagai berikut:

Rute 1: Bandara YIA – Ambar Ketawang – Wirobrajan – Universitas Gajah Mada – Jl. Affandi – Hartono Mal, ada 11 Bus yang melayani dengan headway selama 20 Menit.

Rute 2: Bandara YIA – Gamping – Ring Road Barat – Term. Jombor – Komplek Pemda Sleman –



Angkutan Antarmoda
Sebuah kendaraan angkutan antarmoda milik DAMRI jenis Mercy Sprinter, akan melayani transportasi dari dan ke Bandara YIA. Foto: HMS DJPD/CAS

Sleman City Hall, ada 10 Bus yang melayani dengan headway selama 20 Menit.

Sedangkan untuk dukungan angkutan antarmoda Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Candi Borobudur, rute yang melayani adalah:

Bandara YIA – Tebing Gunung Gajah – Goa Kiskendo – Plono – Samigaluh – Jl. Nanggulan Mendut – Candi Borobudur (via Bukit Menoreh), 11 Bus yang melayani dengan headway selama 30 Menit.

Bandara Yia – Wates – Nanggulan – Dekso – Candi Borobudur, 7 Bus yang melayani dengan headway selama 30 Menit.



1 Menhub didampingi Dirjen Perhubungan Darat, Dirut DAMRI, ketika grand launching angkutan antarmoda Bandara YIA di Shelter Sleman City Hall (31/1). Foto: HMS DJPD/ABA

Candi Borobudur – Term. Muntilan – Term. Jombor – Grand Inna Malioboro, 6 Bus yang melayani dengan headway selama 30 Menit.

“Rute-rute yang kita buat ini, akan berhenti di beberapa tempat, sementara pakai tempat yang ada, tapi ke depan saya sangat berharap kita bersama, Ditjen Perhubungan Darat, DAMRI, maupun pemerintah daerah bisa berkolaborasi menyiapkan tempat shelter, ruang tunggu bagi penumpang,” kata Dirjen Budi. Lebih lanjut dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan angkutan antarmoda ini sehingga dapat mengurangi kemacetan dan menekan angka kecelakaan.

Dirjen Budi mengatakan bahwa jika layanan Angkutan Antarmoda Bandara YIA telah mencapai load factor yang ditargetkan, maka jenis layanan ini akan berubah menjadi layanan komersil.

2 Presiden Jokowi dan Menhub menyimak penjelasan dari Dirjen Perhubungan Darat terkait angkutan antarmoda di Bandara YIA (31/1). Foto: HMS DJPD/ABA

Selama masa pelayanan Angkutan Antarmoda Bandara YIA akan dilakukan evaluasi kebutuhan masyarakat terhadap rute-rute yang diinginkan guna menunjang kebutuhan mobilitas masyarakat.

Layanan Angkutan Antarmoda Bandara YIA ke depannya akan terintegrasi dengan moda lain seperti Kereta Api dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat beralih menggunakan transportasi umum.

Optimalisasi Integrasi Antarmoda
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo akan beroperasi penuh pada 29 Maret 2020, untuk itu Menhub meminta seluruh pihak terkait untuk mengoptimalkan integrasi antarmoda untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat dari dan menuju Bandara tersebut.



3 Dirjen Perhubungan Darat bersama Dirut DAMRI, Bupati Sleman, meresmikan angkutan antarmoda Bandara YIA di Sleman City Hall (30/1). Foto: HMS DJPD/ABA

“Mulai 29 Maret, YIA akan beroperasi penuh, pada saat itu pergerakan penumpang akan akan masif sekali. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Saya telah meminta kepada Dirjen Perhubungan Darat dan PT. Damri untuk mengoptimalkan Headway (waktu tunggu) Bus Damri per 30 menit,” ucap Menhub.

Menhub mengapresiasi langkah Perum Damri yang telah aktif menggunakan media sosial untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. “Tadi saya berbincang dengan beberapa calon penumpang yang akan ke YIA, mereka mengetahui rute-rute dan tarif Bus damri dari Media Sosial. Saya apresiasi langkah komunikasi tersebut dan kita berharap masyarakat tidak bingung lagi ketika YIA sudah beroperasi penuh nanti,” pungkas Menhub.(*)

DIRJEN HUBDAT SAMPAIKAN KOMITMEN INDONESIA DI FORUM UNECE-ITC, SWISS

Transportasi hijau perlu dipromosikan untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan teknologi inovatif seperti kendaraan listrik dan lainnya.



Isu seputar perubahan iklim adalah topik hangat yang cukup relevan dalam perubahan wajah transportasi. Perubahan wajah transportasi ini nantinya akan mengarah kepada perbaikan kondisi lingkungan. Guna membahas hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menghadiri Pertemuan *82nd Session of The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Inland Transport Committee (ITC) High-Level Policy Segment on Environmental Challenges to Sustainable Inland Transport*, 25-26 Februari 2020 di Jenewa, Swiss.

“Kehadiran Kementerian Perhubungan khususnya Ditjen Perhubungan Darat pada pertemuan ini yakni karena Pemerintah Indonesia merupakan *Contracting Party* dari 2 (dua) instrumen internasional yang berada di bawah cakupan wewenang ITC, yakni *TIR Convention 1975* dan *Custom Container Convention 1972* serta telah menandatangani *Road Traffic Convention 1968* dan *Road Sign and Signals 1968*. Pertemuan ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan transportasi masing-masing negara berdasarkan pengalaman dari negara lain, terutama dalam hal menciptakan transportasi berkelanjutan dan membuka peluang kerja sama di bidang transportasi antarnegara sehingga diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan hasil dari pertemuan ini pada masa yang akan datang,” jelas Dirjen Budi.

Pertemuan ini merupakan pertemuan tingkat Menteri/Pejabat setingkat Menteri di bidang transportasi. Pada pertemuan tersebut Kementerian Perhubungan diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi sebagai Ketua Delegasi dan didampingi oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Hubdat Pandu Yunianto, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Cucu Mulyana, serta wakil dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dan Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Hubdat.

“Pada pertemuan *High-Level Policy Segment* bertema “*Environmental Challenges to Sustainable Inland Transport*” (Tantangan Lingkungan Untuk Transportasi Darat Berkelanjutan), dibahas Deklarasi ITC yang bertajuk: *Enhancing Sustainable Inland Transport Solution to Global Climate and Environmental Challenges - A United Call to Action*. Deklarasi ini merupakan deklarasi komitmen yang dibuat oleh para Menteri dan Para Ketua Delegasi yang bertanggung jawab di bidang transportasi pada negara-negara yang hadir tentang pentingnya bersama-sama bertindak terhadap permasalahan perubahan iklim global dan lingkungan,” tambah Dirjen Budi.

Deklarasi tersebut berisi komitmen untuk menghadapi hambatan dan dampak perubahan iklim serta lingkungan di bidang transportasi seperti pemanasan global, gas emisi,

juga dukungan untuk menggunakan transportasi umum, menggalakkan teknologi transportasi ramah lingkungan, serta komitmen dalam mewujudkan lingkungan masa depan dengan menggunakan transportasi secara bijak.

“Melalui deklarasi ini, negara-negara yang hadir menegaskan kembali komitmennya dalam mewujudkan orientasi strategis yang telah ditetapkan pada *United Nations Framework Convention on Climate Change and Its Paris Agreement*, yakni melaksanakan pembangunan berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, degradasi lingkungan. Pada pertemuan ini diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan khususnya terhadap pengembangan kebijakan transportasi di Indonesia serta dengan adanya kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan kerjasama transportasi dengan negara lain,” ujar Dirjen Budi.

Dirjen Budi menyatakan bahwa secara umum Indonesia mencermati dan mengikuti pembahasan Deklarasi tersebut, terlebih kebijakan transportasi di Indonesia secara umum sudah selaras dengan Deklarasi terutama terkait kebijakan, teknologi, dan infrastruktur transportasi Indonesia dalam menghadapi tantangan iklim dan lingkungan.

Penting untuk mengingat kembali komitmen dunia untuk mengimplementasikan climate action dengan cara mengurangi gas buang dan menciptakan inovasi-inovasi di sektor transportasi untuk mengurangi dampak gas buang tersebut terhadap iklim. Untuk itu, transportasi hijau perlu dipromosikan untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan teknologi inovatif seperti kendaraan listrik dan lainnya.

Sebelumnya rombongan Kemenhub juga mengadakan kunjungan dan menjajaki kerjasama dengan *Hess Bus* yang merupakan produsen bus, bus listrik/*trolley bus*, dan kendaraan komersial yang berbasis di Bellach, Swiss. Perusahaan Hess Bus yang didirikan pada tahun 1882 di Solothurn mengedepankan pembuatan *articulated bus* (bus gandeng/tunggal/ganda) untuk memaksimalkan kapasitas angkut bagi angkutan massal berbasis jalan.(*)

TSDP

BUS AIR UNTUK DANAU SENTANI DAN DANAU TOBA



Dalam mendukung terlaksananya kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Jayapura Provinsi Papua serta percepatan pembangunan di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Danau Toba, Kementerian Perhubungan tengah melaksanakan pembangunan kapal penyeberangan sebanyak 9 unit kapal penyeberangan Ro-Ro dan 4 unit Bus Air secara keseluruhan dengan berbagai ukuran. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi saat Peletakan Lunas (Keel Laying) 2 Unit Bus Air Danau Sentani, Papua dan 2 Unit Bus Air Danau Toba, Sumatera Utara yang dilakukan di Galangan Kapal PT. Tri Ratna Diesel Paciran, Lamongan, pada Sabtu (8/3).

“Secara keseluruhan Bus Air Danau Sentani mampu mengangkut 100 penumpang, sementara Bus Air Danau Toba mampu mengangkut 150 orang. Saya mengucapkan syukur tepat pada Sabtu ini kami bersama-sama telah menyaksikan peletakan lunas kapal terpadu untuk 2 unit Bus Air Sentani dan 2 Unit Bus Air Danau Toba yang akan dibangun oleh PT. Tri Ratna Diesel dan PT Tri Setia Cipta Persada,” jelas Dirjen Budi dalam sambutannya.

Senada dengan Dirjen Budi, melalui laporan Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Chandra Irawan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam kesempatan yang sama, menyatakan bahwa kontrak untuk Bus Air Danau Sentani akan berakhir pada 17 September 2020 dan Bus Air Danau Toba akan berakhir pada 18 Desember 2020.

“Bus Air ini merupakan kapal prototipe dan baru pertama kali dibangun di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Seluruh Bus Air ini dibangun dan dilengkapi menurut peraturan Klasifikasi Kapal. Dengan Spesifikasi Teknis Bus Air ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan sa-

rana transportasi yang aman, nyaman, dan selamat. Pembangunan Bus Air ini adalah hal prioritas seperti yang sudah disampaikan dalam rapat pimpinan, karena pembangunan Bus Air ini menunjang konektivitas,” jelas Chandra.

Chandra juga menyatakan agar kedua galangan baik PT. Tri Ratna Diesel dan PT. Tri Setia Cipta Persada dapat mempersiapkan langkah-langkah agar pembangunan bus air – bus air ini dapat terselesaikan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati di dalam kontrak.

“Dengan adanya hal tersebut, kami berharap kepada PT. Tri Ratna Diesel dan PT. Tri Setia Cipta Persada dapat memaksimalkan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada sehingga dapat menyelesaikan pelaksanaan pembangunan,” kata Dirjen Budi.

“Diharapkan dengan pembangunan 2 unit Bus Air untuk Danau Sentani tersebut dapat mendukung terlaksananya kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang akan diselenggarakan di Jayapura Provinsi Papua, dan diharapkan juga setelah selesainya kegiatan PON di Papua, Bus Air tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sarana transportasi penyeberangan maupun wisata di wilayah perairan Danau Sentani. Kemudian Pembangunan 2 (dua) Unit Bus Air untuk Danau Toba ini dilaksanakan dalam rangka mendukung terlaksananya percepatan pembangunan di wilayah KSPN Super Prioritas Danau Toba,” pungkas Dirjen Budi melalui sambutannya.(*)

LALIN

PENTINGNYA DOKUMEN ANDALALIN SEBAGAI REKOMENDASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



Dalam mewujudkan peran Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk melindungi hak-hak pada sistem transportasi dan meminimalisir degradasi baik dalam aspek guna lahan maupun transportasi, Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat melalui Direktorat Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Bimtek Andalalin) Tahun 2020 yang secara resmi dibuka oleh Direktur Lalu Lintas Jalan Sigit Irfansyah di Pangeran Beach Hotel, Padang, Sumatera Barat, pada Rabu (11/3).

Direktur Lalu Lintas Jalan Sigit Irfansyah dalam sambutannya mengatakan, “Dampak lalu lintas kalau secara umumnya di kota-kota besar apabila sedang dilakukan pembangunan sangat luar biasa dampaknya, pada saat ini seringkali kita temui infrastruktur yang berdiri tanpa dilengkapi dokumen Andalalin padahal dokumen ini penting karena akan mencatat serta memberikan rekomendasi dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas.”

Menurutnya, hal itu terlihat pada pusat perbelanjaan, lokasi wisata baru, maupun kawasan pemukiman yang terus berkembang yang dapat menimbulkan masalah baru bagi kegiatan berlalu lintas di pusat kegiatan yang sedang dikembangkan oleh pengelolanya.

“Permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar yakni kemacetan lalu lintas yang berdampak pada berbagai aspek, harapan masyarakat pastinya ingin transportasi yang aman, nyaman, dan lancar. Untuk itu kami selaku pemerintah ingin dalam proses pengembangan dan pembangunan infrastruktur agar melalui proses Andalalin dalam menjaga keselarasan antara guna lahan serta transportasi yang mendukung,” kata Sigit.

Sigit menambahkan, “Dokumen Andalalin diwajibkan bukan hanya sebatas memenuhi syarat administrasi belaka melainkan dengan memiliki dokumen ini akan disahkan dan menjadi acuan untuk proses perizinan berikutnya.”

Untuk memperkuat para pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat pada implementasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Analisis Dampak Lalu Lintas berkenaan dengan tata guna lahan dan transportasi, diharapkan ke depannya semua pihak bersama-sama dapat terlibat dalam menyukseskan pembangunan yang diselenggarakan dengan Andalalin.

Analisis dampak lalu lintas perlu dilakukan untuk mengetahui dampak dari sisi lalu lintas yang akan timbul apabila infrastruktur tersebut dibangun.(*)

SARANA

PEMBERLAKUAN BLUE DI UPUBKB PULOGADUNG



Setelah terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Sampung Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji pada 16 Januari 2019 lalu, maka resmi per Januari 2020 ini mulai diterapkan ketentuan tersebut dengan hadirnya Tanda Bukti Lulus Uji elektronik (BLUE).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi pada Kamis (16/1) mengunjungi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Pulogadung, Jakarta Timur. “Saya berterima kasih pada

seluruh UPUBKB yang ada di Provinsi DKI Jakarta karena per 1 Januari kami telah tetapkan penggunaan BLUE. Dari hasil pengecekan saya tadi di seluruh tahap untuk mobil baru tadi sudah cukup cepat, tidak memakan waktu yang lama. Poin saya yang terpenting adalah tidak ada lagi pungutan liar,” urai Dirjen Budi dalam kesempatan tersebut.

Pemilik kendaraan berjenis mobil bus, mobil barang, Kajian IV (bajaj) wajib melakukan uji berkala atau uji kir setiap 6 bulan sekali dan dilakukan di UPUBKB. Permohonan perpanjangan masa berlaku uji berkala kendaraan ini dilakukan sesuai dengan domisili kendaraan dan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum habis masa berlaku uji berkala.

Dengan didampingi oleh Mirza Aryadi selaku Kepala UPUBKB Pulogadung dan Fatchuri sebagai Kasubag Tata Usaha UPUBKB Pulogadung. Dirjen Budi menilai bahwa pungutan liar atau pungli adalah salah satu hal yang sering dikawatirkan oleh masyarakat.

“Pungli yang dulu sering sekali dipertanyakan masyarakat. Sekarang sangat terbuka sekali prosesnya, sangat cepat, dan bahkan menggunakan sistem untuk pendaftaran dan pembayarannya pun

langsung ke bank,” puji Dirjen Budi usai kunjungannya ke UPUBKB Pulogadung.

Dirjen Budi juga berterima kasih kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta karena telah menjalankan harapan Kementerian Perhubungan mengenai sistem UPUBKB yang lebih cepat dan praktis.



“Saya berterima kasih kepada Dishub Provinsi DKI Jakarta yang sudah menjalankan harapan dari Kementerian Perhubungan yakni BLUE sudah jalan. Saya harapkan Dishub Provinsi DKI Jakarta nanti dapat mempresentasikan mengenai UPUBKB ini bulan Februari di depan seluruh Kadishub se-Indonesia,” tambah Dirjen Budi.

Dengan adanya kartu BLUE yang menggunakan chip seperti sekarang ini maka kartu tersebut dapat digunakan juga sebagai uang elektronik.(*)

dan permasalahan dalam penyelenggaraan UPPKB. “Meningkat masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan UPPKB, seperti kondisi prasarana yang terbatas, kurangnya kuantitas dan kemampuan SDM dalam pengoperasian UPPKB, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengoperasian UPPKB dan kurang optimalnya pemanfaatan aset yang ada”, ujar Mulyahadi.

Acara ini turut dihadiri oleh 80 peserta. Di antaranya adalah perwakilan dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Korsatpel, serta UPPKB seluruh Indonesia.

Ia pun menyampaikan harapannya, “Semoga penyelenggaraan UPPKB menjadi jauh lebih baik dan bebas dari stigma negatif yang melekat pada tahun-tahun sebelumnya,” jelas Mulyahadi.(*)



PRASARANA

PENERAPAN SISTEM WEIGH IN MOTION (WIM) DI JEMBATAN TIMBANG



Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL), Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang (JT) menggunakan sistem Weigh in Motion (WIM) yaitu pengukuran beban kendaraan yang dapat dilakukan ketika kendaraan dalam kondisi bergerak, karena sebelumnya dilakukan dalam kondisi berhenti atau statis. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor Mulyahadi pada Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelenggaraan UPPKB tahun 2020 di Hotel The Rinra, Makassar, pada Rabu (11/3).

“UPPKB tidak hanya menerapkan WIM saja, tapi juga akan menggunakan CCTV dan sensor dimensi yang diletakkan di jalan. Selain itu, saat ini sudah diberlakukan BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) dan juga E-Tilang untuk menghindari pungutan liar,” ujar Mulyahadi.

Ia menyatakan bahwa pengembangan sistem teknologi UPPKB di tahun 2020 yaitu terpasangnya 80 sistem Jembatan Timbang Online (JTO) dan 34 Sensor Dimensi (Vehicle Dimension Sensor) di seluruh UPPKB yang beroperasi di tahun 2020.

Bersamaan dengan hal tersebut, Mulyahadi menyatakan, “Dengan tercapainya Zero ODOL, ke depannya UPPKB pun akan dijadikan tempat penindakan, data center, rest area, dan terminal barang yang dilengkapi dengan alat timbang sehingga dapat lebih berfokus pada pendataan logistik angkutan barang”.

Meskipun demikian, mewujudkan Indonesia yang terbebas dari ODOL tentu tidaklah mudah. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB yang diharapkan mampu menjawab tantangan

LALIN

TINGKATKAN MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS, DITJEN HUBDAT GELAR BIMTEK DI BANDUNG



Dalam meningkatkan pelayanan serta penyelenggaraan lalu lintas agar tetap teratur dan nyaman bagi penggunaannya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas Jalan Tahun 2020 yang resmi dibuka oleh Direktur Lalu Lintas Jalan, Sigit Irfansyah pada saat acara pembukaan di Aston Tropicana Hotel, Bandung, pada Rabu (26/2/2020).

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Sigit Irfansyah bahwa, “Bimtek ini dilakukan untuk semakin memperkuat para pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, informasi tata guna lahan dan transportasi, penetapan jaringan jalan dan simpul transportasi jalan serta pengenalan software Vissim dan Visum.”

Dalam kegiatan ini, peserta yang hadir sejumlah 115 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang berasal dari 28 Dinas

Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat, 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan Direktorat Lalu Lintas Jalan.

Selain itu, Kepala Sub Direktorat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Handa Lesmana melaporkan, “Para narasumber atau pembicara pada kegiatan ini yakni para tenaga pengajar dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia agar para peserta dapat memahami dan mengimplementasikan secara langsung di lapangan.”

Handa menegaskan dengan adanya bimtek ini, bagi peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) dan dapat diusulkan untuk mengikuti kompetensi di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.(*)

TSDP

ANGKUTAN PENYEBERANGAN AKAN MENGALAMI PENYESUAIAN TARIF SEKITAR 11%



Keputusan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan sudah mencapai posisi akhir. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengakui pihaknya belum menentukan besaran nominal tarif karena masih harus mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan pada Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan. Sosialisasi tersebut diadakan di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang pada Jumat (6/3).

“Penyesuaian tarif rata-rata untuk 20 lintasan mengalami kenaikan sekitar 10,92 %. Secara umum persentase kenaikan di lintas Ketapang-Gilimanuk misalnya

sebesar 14,61 % tetapi ada variasi untuk penumpang dan barang. Sementara di Merak-Bakauheni sebesar 10,47%. Kenaikan tarif ini dilakukan karena sudah 3 tahun terakhir ini tidak ada penyesuaian tarif. Sehingga harapannya akan meningkatkan pelayanan keselamatan yang diberikan baik oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai pengelola dermaga maupun oleh operator dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di kapal agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan,” ujar Dirjen Budi dalam kegiatan itu.

Dirjen Budi menjelaskan bahwa sesuai Surat Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: OP.404/1404/VIII/ASDP-2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Usulan Penyesuaian Tarif Pas Masuk dan Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga pada Lingkungan Pelabuhan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), terdapat 10 Cabang (16 Lokasi) Pelabuhan Penyeberangan yang diusulkan untuk penyesuaian tarif. Salah satunya pada Cabang Gilimanuk (Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk).

Tulus Abadi mewakili Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam acara tersebut menyatakan, “Kenaikan tarif yang saat ini sedang diperhitungkan saya rasa akan cukup untuk konsumen. Hanya saja menjadi tugas bagi pemerintah dan penyedia jasa untuk meningkatkan derajat pelayanan dengan tingkat peradaban yang ada, dan setelah itu tentunya kita akan monitor terus.”

Tulus pun mengungkapkan bahwa transportasi sangat mendukung perekonomian nasional. Dapat mewujudkan Visi Presiden Joko Widodo untuk bisa menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, Bali, sampai Nusa Tenggara dengan jalan tol. Maka industri angkutan penyeberangan harus diperbaiki infrastrukturnya dan juga iklim usaha yang kondusif salah satunya adalah tarif yang memadai.

Sementara itu, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Chandra Irawan yang juga hadir mendampingi Dirjen Budi dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa penyesuaian tarif ini sudah mempertimbangkan 3 hal yakni keberlangsungan iklim usaha angkutan penyeberangan, daya beli masyarakat, dan dampak terhadap harga-harga bahan kebutuhan pokok.

“Prosedur penyesuaian tarif ini telah melalui proses pembahasan yang melibatkan regulator, operator, YLKI, dan asosiasi terkait. Selain itu kami juga mengkoordinasikan masukan tersebut dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi,” tambah Chandra.

Dalam keterangannya lebih lanjut Dirjen Budi juga menyatakan pada 1 Mei 2020 mendatang pihaknya akan memperkuat penerapan regulasi dan tidak mengizinkan ada lagi kendaraan ODOL yang masuk ke kapal penyeberangan. Dimensi kendaraan yang tidak sesuai dengan regulasi akan dinormalisasi.(*)

BPTD

DIRJEN HUBDAT MINTA PEMDA OPTIMALKAN MANAJEMEN TRANSPORTASI MASSAL



Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan manajemen transportasi massal yang lebih baik agar masyarakat tertarik untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, sehingga jumlah penumpang pun dapat bertambah. Hal tersebut disampaikan pada acara Peresmian Angkutan Pemandu Moda Bus Rapid Transit (BRT) serta Rapat Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2021 Sektor Perhubungan di Kalimantan Selatan pada Senin (17/2).

“Kalau kita lihat, transportasi massal berbasis darat tumbuhnya tidak begitu cepat dan kurang optimal. Artinya, banyak yang harus kita lakukan agar masyarakat mau beralih dari transportasi pribadi ke angkutan umum,” ujar Dirjen Budi.

Salah satu hal yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan agar masyarakat mulai tertarik menggunakan transportasi umum adalah memberikan BRT ke beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengkaji pengoperasian angkutan umum perkotaan dengan mekanisme pembelian layanan atau Buy The Service (BTS), agar dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan. Namun, pengoperasian oleh Pemerintah Daerah belum sesuai dengan yang diharapkan.

“Masyarakat sepertinya masih kurang melirik transportasi umum, terutama masyarakat di daerah-daerah selain Jakarta. Maka saya berharap Kadishub kabupaten dan kota dapat memaksimalkan mengembangkan manajemen dengan baik, sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat untuk transportasi massal yang mudah, murah, nyaman, dan terjangkau,” jelas Dirjen Budi.*

SARANA



PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN KOMERSIL HARUS SELARAS DENGAN KESELAMATAN BERKENDARA

Dalam mendorong pengembangan industri kendaraan komersil yang berkeselamatan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi yang mewakili Menteri Perhubungan menghadiri acara pameran GAIKINDO Indonesia Internasional Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2020 yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta pada Kamis pagi (5/3). Dalam acara tersebut juga dilakukan kegiatan pemotongan *dump truck* yang over dimensi sebagai bentuk keselarasan antara perkembangan industri kendaraan komersil dengan target pemerintah mewujudkan Indonesia Zero ODOL 2023.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut hadir dan meresmikan acara ini mengatakan, “Pameran ini merupakan salah satu bentuk komitmen Gaikindo untuk mendorong industri otomotif serta membantu perkembangan infrastruktur dan pembangunan di tanah air. Kita harus optimis dalam membangun sektor industri di tengah tekanan kondisi ekonomi global saat ini”.

Selain itu ia juga berharap, ke depannya industri kendaraan dapat berkontribusi untuk terus menyukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti penerapan kebijakan Zero ODOL yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2023 dalam rangka meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Senada dengan pernyataan Menperin, Dirjen Budi dalam keterangannya men-

gatakan, “Pemerintah pada saat ini sangat serius dalam persoalan memberantas ODOL, karena aspek keselamatan merupakan suatu hal yang harus diutamakan. Tidak hanya itu saja, pada saat ini terlihat nyata dampak ODOL juga berimbas pada kerugian negara akibat kerusakan jalan.”

Dirjen Budi menambahkan, “Di awal bulan ini saja pemerintah sudah melarang kendaraan ODOL untuk melintasi penyeberangan Merak – Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk. Kita lakukan sosialisasi bertahap. Selanjutnya, akan segera dilakukan penindakan”.

Dalam hal ini, pihak Ditjen Perhubungan Darat telah bekerja sama dengan pihak Korlantas Polri, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan PT. Jasa Marga untuk melarang truk ODOL melintas di Jalan Tol Tanjung Priuk sampai Bandung.

Dirjen Budi turut menegaskan bahwa, “Kami (Kemenhub) mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan dalam memperbaiki ekosistem dan sistem transportasi khususnya transportasi darat yang berkeselamatan.”

Ia pun berharap dengan diadakan acara pameran kendaraan komersil disertai kegiatan pemotongan truk ODOL dapat memberikan kesadaran kepada semua pihak bahwa pengembangan industri kendaraan harus diselenggarakan dengan peraturan dan keselamatan bersama agar tidak terjadi kembali kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan ODOL.*



LENSA HUBDAT



◀ Launching Angkutan Antarmoda Bandara YIA dan KSPN Borobudur, Yogyakarta, 30 Januari 2020.



◀ Focus Group Discussion Personal Mobility Devices Untuk Transportasi First and Last Mile, Jakarta, 21 Februari 2020.

► Konsolidasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta, 14 Januari 2020.



▼ Pertemuan 82nd Session of The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Inland Transport Committee (ITC) High-Level Policy Segment on Environmental Challenges to Sustainable Inland Transport, 25-26 Februari 2020 di Jenewa, Swiss.



◀ Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat 2020 dengan tema "Penguatan Sinergi Stakeholder Transportasi Darat Untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden RI", Jakarta, 2-3 Maret 2020.

▼ Dirjen Perhubungan Darat Lakukan Normalisasi kendaraan over dimensi di Semarang, 14 Maret 2020.



◀ Sosialisasi Ayo Kita Bersepeda bersama Sobat Gowes. Mari menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi kemacetan dan polusi kota dengan bersepeda dari rumah sampai ke tempat kerja, Jakarta, 28 Februari 2020.



◀ Kunjungan Kerja Dirjen Perhubungan Darat ke Provinsi Lampung, 17 Januari 2020.



► Peletakan Lunas 2 unit kapal bus air untuk Danau Sentani kapasitas 15 penumpang dan 2 unit kapal untuk Danau Toba. Acara tersebut dilaksanakan di galangan kapal Lamongan, 7 Maret 2020.



◀ Penegakan Hukum Kendaraan ODOL di Bandung, Jawa Barat, 10 Maret 2020
▼



► Kunjungan Kerja Dirjen Perhubungan Darat meninjau Terminal Pakupatan, Serang, Banten, 17 Januari 2020

